

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT

TAHUN 2025



Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
Direktorat Jenderal Hortikultura
Kementerian Pertanian

SCAN PERNYATAAN TELAH DI REVIU



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG B LANTAI 2 KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN
TELEPON/FAX (021) 7800220, 7804856 PESAWAT: 3204, 3206, 3219, 3112
WEBSITE : <https://ijen.pertanian.go.id> e-mail: ijen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah pada satker Direktorat Jenderal Hortikultura untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen satker Direktorat Jenderal Hortikultura Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Januari 2026

Inspektur I



Andy Asmara, SE, MM

NIP 197312141994031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi pembangunan sayuran dan tanaman obat 2025–2029 masih mengacu dengan Visi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah: ***“Kemandirian pangan asal hortikultura berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia dalam mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***

Sasaran program yang akan dicapai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mengacu pada *point* 1 dari Program Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025-2029 Pembangunan hortikultura disusun sejalan dengan fokus pada program utama pemerintah yaitu swasembada pangan, makan bergizi dan hilirisasi. Berdasarkan program tersebut maka sasaran program Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran pengembangan sayuran yaitu: 1) Meningkatkan Pendapatan Petani, 2) Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan, 3) Meningkatkan pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian, 4) Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan; dan 5) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi

Fokus pengembangan komoditas sayuran utama adalah aneka cabai, bawang merah, bawang putih, dan komoditas sayuran lainnya seperti kentang, wortel, jamur, sayuran daun, dan sayuran buah. Sasaran pengembangan tanaman obat adalah: 1) Pemenuhan kebutuhan dalam negeri, 2) Penyediaan bahan baku industri, 3) Peningkatan volume ekspor komoditas hortikultura. Fokus pengembangan komoditas tanaman obat adalah jahe, kunyit, kapulaga, kencur, temulawak, lengkuas, jeruk nipis, lidah buaya, dan buah merah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dapat dikatakan berhasil, karena capaian kinerja dari 5 (lima) Indikator yaitu 1) Rata-rata luas panen komoditas sayuran prioritas dengan persentase hasil kinerja 97,82 % (berhasil), 2) Rata-rata luas panen komoditas tanaman obat prioritas dengan persentase hasil kinerja 87,73 % (berhasil), 3) Peningkatan luas panen Hortikultura KSPU Sumatera Utara 38,76% (kurang berhasil), 4) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terhadap layanan ketatusahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dengan persentasi hasil nilai kepuasan 102,15 % (sangat berhasil). Hasil pencapaian peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dilakukan melalui dukungan dana APBN dan juga swadaya pelaku usaha

Berbagai keberhasilan dan manfaat telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan tanaman sayuran dan tanaman obat tahun 2025, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa permasalahan dan hambatan, baik dari aspek teknis budidaya maupun aspek manajemen. Beberapa permasalahan dan hambatan yang ditemui adalah sebagai berikut: (1) Kemampuan adopsi teknologi budidaya terbaru masih terbatas; (2) Penerapan GAP/SOP budidaya belum optimal; (3) Terbatasnya pengembangan bawang merah off season; (4) Terbatasnya ketersediaan benih tanaman obat bermutu yang memenuhi 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, tempat, waktu, harga) (5) Harga benih bermutu relatif mahal; (6) Penerapan budidaya bawang

merah menggunakan benih biji atau True Shallot Seed (TSS) masih terbatas; (7) Penggunaan pestisida yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan sifat fisik dan kimia tanah, disamping itu tingkat pencemaran lingkungan dan residu pestisida tinggi; dan (8) Penggunaan sarana pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan belum optimal.

Permasalahan dari aspek manajemen adalah: (1) Adanya refocusing anggaran dan proses revisi POK/ ROK beberapa kegiatan untuk disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat; (2) Adanya pergantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada beberapa provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan tugas pembantuan dari pusat, sehingga berimplikasi pada tertundanya pelaksanaan kegiatan dan proses penyerapan anggaran; (3) Penjadwalan pengadaan sarana produksi sayuran dan tanaman obat melalui ULP di beberapa daerah sering tidak menjadi prioritas. Hal ini dapat menyebabkan realisasi kegiatan terlambat atau tidak dapat direalisasikannya kegiatan karena musim tanam sudah lewat; (4) Petani tidak berani mengambil resiko gagal panen akibat penanaman di luar musim; (5) Keterbatasan jumlah SDM kesatkeran, teknis, lapang dan monev; (6) Koordinasi antara satker provinsi dan satker kabupaten dalam pelaksanaan TP provinsi belum berjalan sinergis.

Beberapa upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk perbaikan tersebut, antara lain sebagai berikut: (1) Pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di luar sentra eksisting; (2) Mendorong budidaya ramah lingkungan; (3) Menyusun perencanaan yang baik dalam pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat untuk mengurangi permasalahan yang terjadi baik secara teknis maupun administratif; (4) Berkoordinasi dengan instansi perbenihan dalam hal penyediaan benih untuk mendukung pengembangan sayuran dan tanaman obat tahun berikutnya; (5) Meningkatkan kompetensi SDM melalui pembinaan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, bimbingan teknologi dan pelatihan manajemen baik di tingkat pusat maupun di daerah bekerjasama dengan instansi terkait; (6) Membantu petugas dan petani dalam mendapatkan akses inovasi teknologi tepat guna dalam mengantisipasi kondisi iklim (kelebihan hujan dan kekeringan).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya maka Laporan Kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dapat kami susun. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2025, serta pelaksanaan mandat sesuai dengan Tupoksi Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Berdasarkan laporan ini, kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat telah menunjukkan hasil yang baik, meskipun ditemukan beberapa permasalahan dan kendala dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan di Tahun selanjutnya.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil kerjasama dan sinergi segenap pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun Dinas Pertanian Kabupaten/kota dan Propinsi, Pelaku usaha, dan para Champion. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya atas dukungan semua pihak sehingga Laporan Kinerja dapat disusun secara tepat waktu.

Jakarta, Januari 2026



Dr. Muhammad Agung Sunusi, SP, M.Si
NIP. 19750617 200212 1 001

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT

Pengarah :

Dr. Muhammad Agung Sunusi, SP, M.Si

Editor

- : 1. Subardi, STP. MSi
Ketua Kelompok Sayuran Umbi
2. Mutiara Sari, STP, Ph.D
Ketua Kelompok Sayuran Buah
3. Ernawati HR, SP, MM
Ketua Kelompok Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran

Tim Penyusun :

1. Junika Megawati Pasaribu, SP, M.Si (PMHP Madya)
2. Ardi Julianto, SP (PMHP Muda)
3. Apriyanti Roganda Yuniar, SP,M.Si (PMHP Muda)
4. Fajar Anggaraeni, SP, M.Ling (PMHP Muda)
5. Eka Puji Astuti, S.Gz, MP (Analisis kebijakan Pertama)
6. Heny Novrianty, SP, M.AP (Analisis kebijakan Pertama)
7. Ella Winda Rahmatika, S.Si (Statistisi Ahli Pertama)
8. Siti Hurriyah Rahimy, S.TP (PMHP Muda)
9. Nur Azmi (PMHP Pertama)
10. Citra Lestari, S.P (PMHP Pertama)
11. Katarina Ika Novianita, SP (PMHP Pertama)
12. Cahyo Mulyo Putranto, SP (PMHP Pertama)
13. Fajar Istiqomah

DAFTAR ISI

SCAN PERNYATAAN TELAH DI REVIU	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	2
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia (TU)	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.2 Visi	6
2.3 Tujuan	6
2.4 Sasaran Program	7
2.5 Arah Kebijakan	7
2.6 Strategi	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025	22
3.2 Akuntabilitas Keuangan	63
3.3.1 Aspek Budaya	63
3.3.2 Aspek Manajemen	67
3.4 Tindak Lanjut/Rencana Aksi	67
BAB IV PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025	18
Tabel 2. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025	22
Tabel 3. Rata-Rata Luas Panen Komoditas Sayuran Prioritas 5 (Lima) Tahun Terakhir.....	23
Tabel 4. Persentase Kenaikan/ Penurunan Luas Panen Komoditas Sayuran Strategis dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir	25
Tabel 5. Rata-Rata Luas Panen Komoditas Tanaman Obat Strategis 5 (Lima) TahunTerakhir	33
Tabel 6. Persentase Kenaikan/ Penurunan Luas Panen Komoditas Tanaman Obat Strategis Dalam Periode 5 (Lima) Tahun Terakhir	33
Tabel 7. Data Luas Panen KSPP Sumatera Utara Tahun 2024 dan 2025	35
Tabel 8. Interpretasi Indeks Kepuasan Rata-Rata	38
Tabel 9. Capaian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan Tahun 2025.....	40
Tabel 10. Pilihan Paket 1 Bantuan Kegiatan P2B	42
Tabel 11. Pilihan Paket 2 Bantuan Kegiatan P2B	42
Tabel 12. Pilihan Paket 3 Bantuan Kegiatan P2B	42
Tabel 13. Capaian Output Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B).....	44
Tabel 14. Capaian Output Kawasan Cabai	49
Tabel 15. Capaian Output Kawasan Bawang Putih	51
Tabel 16. Bimtek Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B).....	54
Tabel 17. Bimtek Bawang Putih Unggul Kemitraan dengan Pelaku Usaha.....	56
Tabel 18. Target Oplah, CSR, BP, LTT Reguler, dan Padi Gogo.....	58
Tabel 19. Realisasi Total LTT reguler dan padi gogo Kabupaten Paluta per 31 Desember 2025	60
Tabel 20. Realisasi Total LTT reguler dan padi gogo Kabupaten Palas per 31 Desember 2025	60
Tabel 21. Realisasi Brigade Pangan Kab. Paluta dan Palas	61
Tabel 22. Realisasi Anggaran Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025.....	62
Tabel 23. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Output Kegiatan Tahun 2025 untuk Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025.....	4
Gambar 2. Luas Panen Komoditas Sayuran Strategis Tahun 2021-2025	24
Gambar 3. Luas Panen Komoditas Aneka Cabai Tahun 2021-2025	26
Gambar 4. Luas Panen Komoditas Bawang Merah Tahun 2021-2025.....	27
Gambar 5. Luas Panen Komoditas Bawang Putih Tahun 2021-2025.....	28
Gambar 6. Luas Panen Komoditas Kentang Tahun 2021-2025	29
Gambar 7. Luas Panen Bawang Daun Tahun 2021-2025	29
Gambar 8. Luas Panen Komoditas Tomat Tahun 2021-2025	30
Gambar 9. Luas Panen Sawi/Petsai Tahun 2021-2025.....	30
Gambar 10 . Luas Panen Komoditas Wortel Tahun 2021-2025	31
Gambar 11. Luas Panen Komoditas Jamur Tahun 2021-2025.....	32
Gambar 12. Luas Panen Komoditas Tanaman Obat Tahun 2021-2025.....	34
Gambar 13. Grafik Tingkat Kepuasan Kinerja Tata Usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.	38
Gambar 14. Kegiatan Pekarangan Hortikultura (Serah Terima Bantuan).....	46
Gambar 15. Kegiatan Pekarangan Hortikultura (Pertanaman)	47
Gambar 16. Kegiatan Pekarangan Hortikultura (Panen)	48
Gambar 17. Kegiatan Kawasan Aneka Cabai	50
Gambar 18. Pengembangan Kawasan Bawang Putih (Aktivitas Budidaya)	52
Gambar 19. Bimbingan Teknis Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B).....	55
Gambar 20. Bimbingan Teknis Kegiatan Bawang Putih Unggul Kemitraan dengan Pelaku Usaha ..	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	71
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktur Sayuran dan Tanaman Obat (Revisi 7/Akhir)	74
Lampiran 3. Hasil Survey Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025	75
Lampiran 4. Tindak Lanjut/ Rencana Aksi Kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025	76
Lampiran 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	77
Lampiran 6. SK KEPMENTAN 109_TAHUN 2025_PERUBAHAN DUA_PJ_PROVINSI_KAB_KOTA_SWASEMBADA PANGAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketersediaan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, sektor pertanian dihadapkan pada berbagai tantangan global yang semakin kompleks, antara lain perubahan iklim, dinamika geopolitik, fluktuasi harga pangan dunia, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya transformasi sistem pertanian yang lebih adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Program Presiden Prabowo berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui beberapa program prioritas salah satunya swasembada pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dirancang untuk memperkuat kemandirian Pangan dan Kebijakan Hilirisasi. Dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura selaku pemegang kebijakan dalam menjamin ketersediaan pangan pada tahun 2025 melaksanakan program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Beberapa kegiatan pengembangan komoditas sayuran yang masuk ke dalam komoditas pangan strategis seperti bawang merah, bawang putih dan aneka cabai dilaksanakan melalui pengembangan dan pemantapan sentra produksi di Pulau Jawa serta penumbuhan sentra produksi di Luar Pulau Jawa. Untuk komoditas sayuran lainnya dan tanaman obat disesuaikan dengan sentra produksi yang aktif untuk memasok kebutuhan daerah, kota-kota besar dan industri serta ekspor.

Dalam pengembangan agribisnis sayuran dan tanaman obat masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu: 1) skala usaha kecil-kecil, terpencar-pencar dan cenderung semakin menyempit; 2) belum diterapkan praktik budidaya yang baik (GAP/SOP); 3) terbatasnya ketersediaan benih bermutu terutama untuk tanaman obat; 4) rendahnya produktivitas karena kualitas kesuburan lahan yang semakin menurun; 5) belum efisiennya manajemen usaha, 6) belum diterapkannya prinsip manajemen rantai pasok dengan baik; 7) belum berpihaknya kebijakan dan regulasi perbankan kepada petani; 8) belum memadainya sarana transportasi; 9) sangat rumitnya persyaratan ekspor negara tujuan, 10) derasnya persaingan produk impor, belum berkembangnya tata niaga produk hortikultura yang berkeadilan, belum berkembangnya industri pendukung (agroinput, industri olahan, industri hilir, jasa transportasi dan perdagangan); 13) terbatasnya lembaga pembiayaan; 14) rendahnya daya serap akses perbankan karena petani tidak *bankable*; serta 15) masih terbatasnya SDM muda yang berminat di bidang pertanian. Akumulasi berbagai permasalahan tersebut menyebabkan sayuran dan tanaman obat belum mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing dengan komoditas padanannya yang berasal dari negara lain.

Sejalan dengan kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, maka salah satu target kinerja utama yang ditetapkan adalah terbangunnya kawasan sentra produksi sayuran dan tanaman obat. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Sayuran dan Tanaman Obat, setiap tahunnya Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 278/KPTS/OT.050/06/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Tugas Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lainnya dan tanaman obat.

Uraian tugas Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terdiri dari :

A. Kelompok Sayuran Buah

- 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Sayuran Buah.
- 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Sayuran Buah.

B. Kelompok Sayuran Umbi

- 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Sayuran Umbi.
- 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Sayuran Umbi.

C. Kelompok Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain

- 1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain.
- 2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat Sayuran dan tanaman Obat memiliki 3 (tiga) kelompok, 1 (satu) subbagian tata usaha (Eselon IV) yaitu:

- a. Kelompok Sayuran Buah
- b. Kelompok Sayuran Umbi
- c. Kelompok Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lainnya
- d. Subbagian Tata Usaha

Fungsi dari masing-masing kelompok dan subbagian tata usaha tersebut sebagai berikut:

Fungsi dari masing-masing kelompok dan subbagian tata usaha tersebut sebagai berikut:

a. Kelompok Sayuran Buah

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi, pengembangan kawasan dan kelembagaan sayuran buah.

1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Sayuran Buah

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi sayuran buah.

2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Sayuran Buah

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan dan kelembagaan sayuran buah.

b. Kelompok Sayuran Umbi

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi, pengembangan kawasan dan kelembagaan sayuran umbi.

1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Sayuran Umbi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi sayuran umbi.

2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Sayuran Umbi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan dan kelembagaan sayuran umbi.

c. Kelompok Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi, pengembangan kawasan dan kelembagaan tanaman obat, jamur dan sayuran lain.

1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain

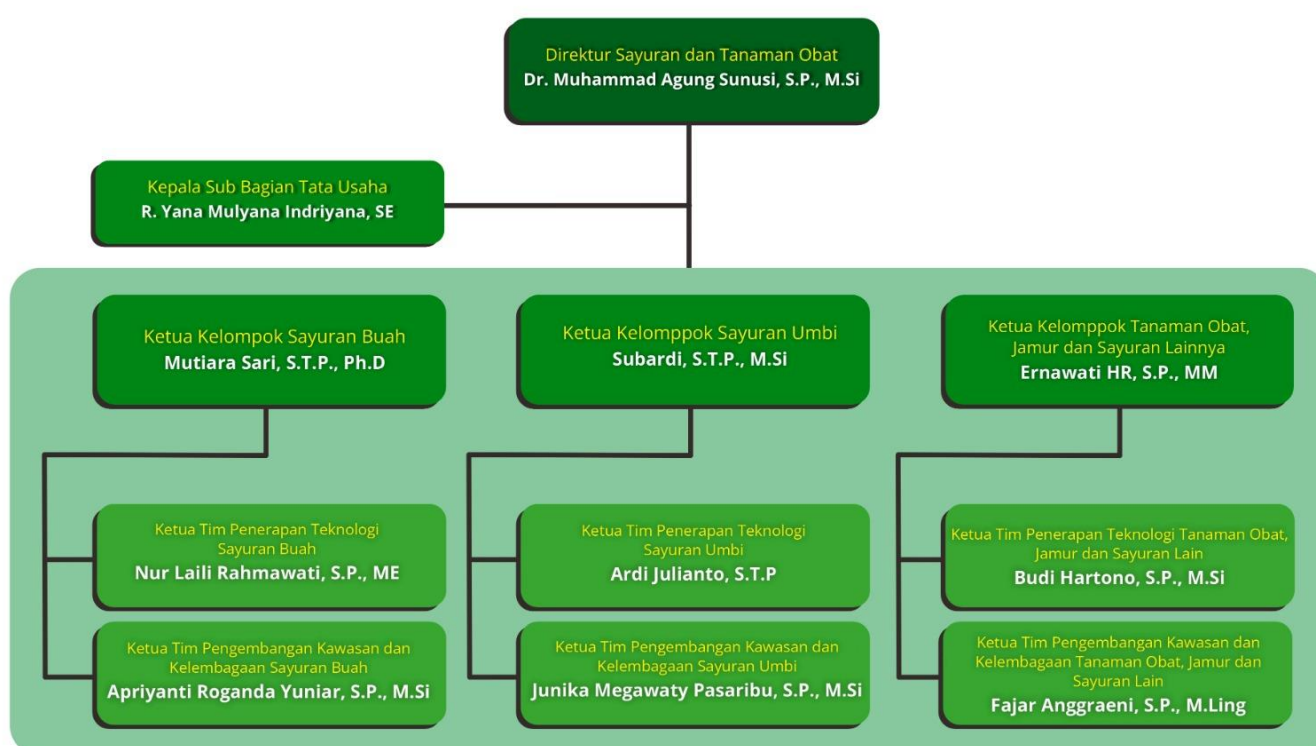
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan teknologi tanaman obat, jamur dan sayuran lain.

2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan dan kelembagaan tanaman obat, jamur dan sayuran lain.

d. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Susunan struktur organisasi Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025 pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia (TU)

Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat pada tahun 2025 sebanyak 63 orang, PNS Perempuan 28 orang, PNS Laki-laki 20 orang, P3K full waktu sebanyak 10 orang dan P3K paruh waktu 3 orang. Rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu: Doktor (S3) sebanyak 3 orang, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 17 orang, Sarjana (S1) sebanyak 27 orang, SMA/SMK sebanyak 15 orang, dan SD sebanyak 1 orang. Rincian daftar pegawai di Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat disajikan pada Lampiran 1.

masing- masing kelompok dan subbagian tata usaha lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

1.5. Dukungan Anggaran

Pagu akhir yang diterima untuk mendukung kegiatan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat tingkat satker pusat pada tahun 2025 adalah Rp.185.550.333.000,-. Rincian Output (RO) kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat terdiri dari: 1) Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan, 2) Pekarangan Hortikultura, 3) Kawasan Aneka Cabai, dan 4) Kawasan Bawang Putih.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut antara lain: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi: a) Rencana Strategis (Renstra), b) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan c) Perjanjian Kinerja (PK). Komponen-komponen terkait perencanaan dan perjanjian kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dijelaskan berikut ini.

2.1 Rencana Strategis 2025 – 2029

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga melaksanakan penyiapan rancangan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga periode 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan hortikultura lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025–2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 , sekaligus menjadi wujud komitmen Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045 serta Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

2.2 Visi

Visi pembangunan hortikultura 2025–2029 mendukung Visi Presiden dan merupakan bagian dari Visi Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu ***“Kemandirian pangan asal hortikultura berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia dalam mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***

2.3 Tujuan

Tujuan Pembangunan Hortikultura 2025-2029 merupakan bentuk capaian Visi dalam jangka waktu yang lebih pendek dan mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan asal hortikultura dari produksi dalam negeri.
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura.
3. Terwujudnya tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang transparan, akuntabel dan profesional

2.4 Sasaran Program

Sasaran program yang akan dicapai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mengacu pada *point* 1 dari Program Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025-2029 Pembangunan hortikultura disusun sejalan dengan fokus pada program utama pemerintah yaitu swasembada pangan, makan bergizi dan hilirisasi. Berdasarkan program tersebut maka sasaran program Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat adalah sebagai berikut:

A. Sasaran pengembangan sayuran yaitu:

- 1) Meningkatkan Pendapatan Petani
- 2) Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan
- 3) Meningkatkan pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian
- 4) Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan
- 5) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.

Fokus pengembangan komoditas sayuran utama adalah aneka cabai, bawang merah, bawang putih, dan komoditas sayuran lainnya seperti kentang, wortel, jamur, sayuran daun, dan sayuran buah.

B. Sasaran pengembangan tanaman obat adalah:

- 1) Terpenuhinya produksi hortikultura dalam negeri
- 2) Penyediaan bahan baku industri
- 3) Meningkatnya volume ekspor komoditas hortikultura

Fokus pengembangan komoditas tanaman obat adalah jahe, kunyit, kapulaga, kencur, temulawak, lengkuas, jeruk nipis, lidah buaya, dan buah merah.

2.5 Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025, RPJMN 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus pondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam

delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.6 Strategi

Strategi pengembangan tanaman sayuran dan tanaman obat yang menjadi fokus utama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pekarangan Pangan Bergizi Mendukung Ketahanan Pangan

Prioritas pemanfaatan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2025 adalah mendukung program pangan bergizi melalui pekarangan. Pemanfaatan pekarangan untuk mendukung penyediaan pangan bergizi diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan dan gizi keluarga.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 60 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Dalam Pasal 42 juga diamanatkan bahwa upaya tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura selaku pemegang kebijakan dalam menjamin ketersediaan pangan akan melaksanakan program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

adalah konsep pertanian yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang bergizi, seperti sayuran dan buah-buahan.

Optimalisasi pekarangan pada kegiatan P2B ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. P2B juga merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung Program strategis nasional yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan bahan baku berupa sayuran, buah, protein dan karbohidrat.

Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) adalah konsep pertanian yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang bergizi, seperti sayuran dan buah-buahan. Tujuan dari pekarangan pangan bergizi adalah untuk menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan bermanfaat bagi keluarga, serta mendukung ketahanan pangan lokal. Program P2B memiliki sasaran yaitu 13.500 kelompok yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ Kelompok PKK/ Kelompok masyarakat lainnya dengan syarat desa mudah diakses, memiliki dana desa, terdapat BUMDES/BUMDESMA, kepala desa mendukung terhadap kegiatan P2B dan peduli pertanian serta pangan. Pelaporan dan monev mendukung pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) akan dikemas di dalam aplikasi sederhana sehingga memudahkan petugas pusat dan daerah dalam penginputan hasil laporan dan evaluasi kegiatan secara real time.

2. Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat

Secara spesifik pengembangan hortikultura sesuai dengan Fokus Pertama diarahkan pada Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat, sehingga dapat dibangun Kawasan Hortikultura Skala Ekonomi.

Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat meliputi kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang sesuai dengan agroekosistem dan lokasinya dapat berupa hamparan dan atau luasan lahan terpisah, dalam satu kawasan yang dihubungkan dengan aksesibilitas memadai. Kegiatan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat dilaksanakan di Kabupaten dengan pendampingan yang intensif, yang dalam pelaksanaan maupun pendanaannya dapat melibatkan berbagai institusi pemerintah, pelaku usaha hortikultura maupun swasta, tujuannya adalah saling mendukung dan saling mengisi sesuai bidang tugas, potensi dan sumberdaya masing-masing.

Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa benih bermutu, saprodi (pupuk organik, anorganik, kapur pertanian/dolomit, mulsa plastik, dan lain-lain), dan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ramah Lingkungan. Selain itu, pengawalan dan pendampingan secara intensif akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga ke depan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.

Program pengembangan kawasan Sayuran dan Tanaman Obat akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak terbentuk kawasan penghasil produk hortikultura bermutu yang seragam varietasnya guna pemenuhan konsumsi domestik, kebutuhan bahan baku industri Sayuran dan Tanaman Obat dan ekspor produk segar maupun olahan. Sasaran akhir dari Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat ini yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Perdesaan.

Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat menjadi lokus kegiatan terintegrasi dengan instansi/lembaga lain sehingga terbentuk pengutuhan dukungan pengembangan yang mengarah kepada peningkatan daya saing yang berkelanjutan. Disamping fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi segar dan olahan, kampung sayuran dan tanaman obat berpotensi menjadi lokasi agrowisata (*agro-eduwisata*) sehingga dapat secara langsung memberi alternatif tujuan pariwisata daerah setempat dan turut mendorong pemasyarakatan sayuran dan tanaman obat kepada masyarakat luas.

Penumbuhan UMKM di dalam kawasan sayuran dan tanaman obat dilakukan sebagai wujud dukungan terhadap upaya menumbuhkembangkan UMKM sebagai fondasi bagi peningkatan perekonomian di tanah air. Dukungan penumbuhan UMKM sayuran dan tanaman obat diantaranya dalam bentuk: 1) Kemitraan dengan *stakeholder* untuk penumbuhan UMKM sayuran dan tanaman obat, 2) Peningkatan kapabilitas melalui bimbingan teknis, 3) Promosi dan pemasaran produk sayuran dan tanaman obat.

Melalui keterpaduan fasilitasi ini, diharapkan UMKM sayuran dan tanaman obat selaras dengan program pemerintah dalam percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Strategi ini merupakan salah satu opsi untuk menuntaskan permasalahan yang umum terjadi saat panen raya dimana produk berlimpah menyebabkan harga produk turun bahkan ada yang terbuang sehingga dapat menurunkan motivasi petani untuk tetap menanam.

Salah satu tantangan dalam penumbuhan UMKM adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaku dan penggerak usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan dan memastikan peningkatan kapabilitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis yang diperlukan.

3. Digitalisasi Pertanian

Digitalisasi diperlukan untuk mempermudah kegiatan agar hasilnya lebih cepat, akurat dan mutakhir. Kementerian Pertanian menerapkan digitalisasi sebagai upaya percepatan, akurasi dan pemutakhiran informasi pertanian dalam rangka mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern. Salah satu digitalisasi yang diterapkan di bidang hortikultura adalah pengembangan aplikasi untuk kegiatan pengawasan/monitoring, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sayuran dan tanaman obat. Sistem pelaporan dan monitoring berbasis website ini mampu mempermudah mekanisme pelaporan bagi stakeholders terkait, memperkuat fungsi monitoring bagi petugas atau aparaturnya serta menyajikan data yang lebih cepat dan akurat bagi pimpinan organisasi.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mengembangkan aplikasi Sistem Registrasi Kampung Sayuran dan Tanaman Obat Berdaya Saing (SRIKANDI) dan Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (SIMETHRIS). Aplikasi SRIKANDI menghimpun database dari seluruh unit kegiatan berdasarkan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang diusulkan dan/ atau disahkan oleh Dinas Pertanian, kemudian diolah dan disajikan sedemikian rupa menjadi sistem informasi yang mudah diakses, menarik, valid dilengkapi dengan data dukung dokumentasi. Perangkat ini akan memudahkan pengguna (*user*) utamanya pengambil kebijakan di level pusat dan daerah bahkan petani dalam mengakses informasi dan layanan yang disediakan.

Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Hortikultura untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan dalam negeri dan ekspor. Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terus berupaya mengembangkan kawasan melalui berbagai pendekatan.

Aplikasi SRIKANDI dibangun sejak tahun 2021 sebagai terobosan inovasi pelayanan kepada pelaku usaha atau petani terkait informasi kampung sayuran dan tanaman obat. Pada tahun 2024 dilakukan pengembangan aplikasi berupa perbaikan proses bisnis sesuai kebutuhan pengembangan sistem serta peningkatan *interoperabilitas* dengan sistem aplikasi lainnya.

Aplikasi lain yang telah dikembangkan oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat adalah Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (SIMETHRIS) yang digunakan untuk memantau pelaksanaan wajib tanam dan produksi bagi pelaku usaha impor bawang putih. Bawang putih merupakan salah satu komoditas strategis yang didorong pengembangannya untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kementerian Pertanian terus melakukan segenap upaya peningkatan produksi melalui perluasan areal tanam dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan swasta atau pelaku usaha impor bawang putih melalui program pengembangan kawasan bawang putih.

Peraturan Menteri Pertanian No. 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis mengamanatkan pelaku usaha impor (importir) bawang putih penerima Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian c.q Direktorat Jenderal Hortikultura untuk melakukan penanaman bawang putih dan berproduksi minimal 5% dari volume impor bawang putih. Permentan tersebut juga mengamanatkan agar seluruh kegiatan tanam sampai dengan produksi yang dilakukan oleh tiap importir dapat dilaporkan secara daring (*online*) sehingga mempermudah kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan importir, untuk dapat memonitor perkembangannya melalui sistem yang transparan dan juga akuntabel. Laporan yang diberikan oleh tiap importir kepada Pemerintah haruslah dapat termonitor dan terverifikasi kebenaran dan keakuratannya sehingga dapat menjadi pendukung bagi kebijakan dalam penerbitan rekomendasi selanjutnya.

Untuk mendukung kegiatan pelaporan dan monitoring realisasi tanam dan produksi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha impor bawang putih, maka diperlukan aplikasi SIMETHRIS untuk menyajikan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kawasan sayuran umbi khususnya bawang putih serta melakukan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan secara tersistem.

Aplikasi Pemantauan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) merupakan sistem informasi digital berbasis web yang dirancang untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan P2B dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Aplikasi ini dapat diakses secara daring melalui perangkat komputer, sehingga memudahkan pelaksana kegiatan dan pemangku kepentingan dalam melakukan pemantauan secara *real time*.

Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana pendataan dan monitoring perkembangan kegiatan pekarangan pangan bergizi yang dikelola oleh kelompok penerima manfaat. Data yang dihimpun meliputi identitas CPCL kelompok, realisasi bantuan fisik yang diterima serta capaian kinerja baik *on farm* maupun *off farm*. Dengan sistem berbasis web, data dapat diperbarui secara berkala dan tersimpan secara terpusat.

Selain sebagai alat pemantauan, aplikasi P2B juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Informasi yang tersaji dalam bentuk *dashboard*, grafik, dan peta sebaran memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk memantau capaian program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah tindak lanjut secara cepat dan tepat untuk tahun setelahnya.

Aplikasi ini juga dapat dilengkapi dengan fitur pendukung, seperti *list question and answer* yang sering kali ditanyakan oleh daerah, panduan pelaksanaan kegiatan P2B serta kontak admin jika terjadi kendala dalam penginputan laporan di aplikasi. Melalui penerapan aplikasi pemantauan Pekarangan Pangan Bergizi, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Aplikasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kegiatan P2B dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ketahanan pangan, gizi, dan kesejahteraan masyarakat.

2.7 Langkah Operasional

Strategi pembangunan sayuran dan tanaman obat didukung oleh langkah operasional sebagai berikut:

1. Stabilisasi Pasokan Komoditas Strategis

Komoditas sayuran dan tanaman obat memiliki salah satu peran strategis yaitu menjaga inflasi nasional dengan penyediaan pasokan khususnya cabai dan bawang merah dalam jumlah yang mencukupi. Pembangunan kawasan cabai dan bawang merah tahun 2020- 2024 dilakukan secara intensif dan telah mampu membentuk kawasan baru yang menjadi pilar pasokan di wilayah baru terutama di luar Pulau Jawa. Penumbuhan kawasan baru tersebut telah mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga cabai dan bawang merah dan menekan inflasi dengan cukup efektif.

Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah masih diperlukan yaitu membangun kawasan baru dan memanfaatkan lahan marjinal potensial khususnya yang berada di luar Pulau Jawa. Pengembangan di luar Pulau Jawa dapat disertai dengan inovasi perbenihan maupun budidaya seperti dengan penggunaan benih *True Shallot Seed* (TSS) dan sistem irigasi efektif. Pengembangan kawasan kedua komoditas diintegrasikan dengan penggunaan input produksi yang lebih efektif dan efisien serta dapat menggunakan teknik *smart farming* untuk menghadapi

perubahan iklim. Tantangan pengembangan cabai di masa yang datang adalah kepastian pasokan sepanjang tahun dengan terobosan penanaman saat musim kemarau dan panen saat musim hujan. Untuk itu, kerjasama dengan *champion*/pelaku usaha cabai dan bawang merah perlu dilakukan untuk menjamin pasokan dan menjaga inflasi. Selain itu, sistem penyimpanan cabai pada saat produksi melimpah perlu dikembangkan di kawasan utama. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor dilakukan dengan kebijakan pengendalian impor dan pengembangan bawang putih di dalam negeri secara berkelanjutan. Produksi bawang putih nasional berpotensi untuk ditingkatkan secara berkelanjutan seiring dengan potensi pasar yang besar dan kekhasan karakteristik bawang putih nasional dibandingkan bawang putih impor. Pengembangan kawasan bawang putih dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak terutama pihak swasta untuk percepatan peningkatan produksi.

2. Peningkatan Pasokan Komoditas Unggulan

Potensi pasar yang masih terbuka lebar baik domestik maupun internasional untuk produk sayuran dan tanaman obat mendorong Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat untuk terus mendorong peningkatan produksi dan daya saing Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Hal ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan akses produk sayuran dan tanaman obat bagi konsumen. Strategi terpadu yang disiapkan dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan pasokan komoditas Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat unggulan adalah sebagai berikut:

- a) Fasilitasi input produksi
- b) Pendampingan agribisnis yang terjadwal
- c) Pengelolaan agribisnis secara komprehensif
- d) Peningkatan aksesibilitas informasi, keuangan, peluang pasar, teknologi dan penyuluhan
- e) Pemanfaatan teknologi modern dan ramah lingkungan
- f) Pemberdayaan kelembagaan usaha/korporasi petani

Langkah-langkah strategis tersebut memerlukan dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak. Sinergitas antar pelaku dalam sistem agribisnis sangat diperlukan untuk memperkuat pengembangan sayuran dan tanaman obat dari hulu hingga hilir.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mendorong terbangunnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjawab tantangan meningkatkan pasokan komoditas unggulan sayuran dan tanaman obat. Beberapa hal yang dilaksanakan dalam membangun sinergitas dalam rangka peningkatan pasokan adalah sebagai berikut:

- Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah penerima dana pengembangan Kawasan melalui APBN.
- Mendorong swasta dan eksportir sebagai avalis/mitra petani sayuran dan tanaman obat.
- Mendorong penyerapan dana KUR Perbankan/ Lembaga Keuangan lain.
- Pelibatan Akademisi/Perguruan Tinggi dalam penyusunan norma/ pedoman/standar/ kebijakan.

3. Penerapan GAP/SOP dalam Pembudidayaan Sayuran Berorientasi Produk Bermutu Tinggi

Peningkatan produksi dan mutu komoditas sayuran dan tanaman obat berdasarkan pada implementasi *Good Agricultural Practices (GAP)/Standard Operational Procedure (SOP)* mengakomodasikan kondisi spesifik lokasi pada pengembangan kawasan hortikultura. Inovasi teknologi yang digunakan dan dikembangkan adalah yang berorientasi pada pertanian organik dengan penekanan pada pemanfaatan sumberdaya hayati. Pertanian organik merupakan pilihan terbaik untuk dikembangkan dalam kurun waktu 15 tahun ke depan. Hal tersebut mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan meningkatnya degradasi lahan dan pencemaran lingkungan karena intensifikasi pemakaian bahan anorganik, seperti pupuk dan pestisida.

4. Penguatan Pemanfaatan Benih Bermutu

Perbenihan merupakan tulang punggung penyediaan komoditas/varietas unggul yang diinginkan oleh pasar. Proses produksi perlu dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan aspek kebutuhan, jenis/varietas komersial, hingga pada kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan untuk menghasilkan benih unggul tepat waktu, tepat jumlah dan tepat vareitas/jenis. Produksi benih yang dihasilkan oleh balai benih hortikultura dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun diserahkan kepada masyarakat secara luas sehingga terjamin mutu dan kebenaran varietasnya.

Benih yang digunakan perlu didukung oleh sistem yang menjamin kebenaran varietas yang diperdagangkan sehingga memudahkan pengawasan benih yang beredar di masyarakat. Sistem pengawasan peredaran benih perlu diperkuat agar mampu menjadi tumpuan dalam meningkatkan keyakinan konsumen. Sistem perbenihan perlu dibangun secara utuh dan bersifat nasional serta dapat diketahui perkembangan informasinya oleh masyarakat luas.

Kebutuhan varietas komersial akan semakin meningkat dan semakin dinamis. Pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan yang efektif dan berkualitas untuk lahirnya benih- benih unggul tanaman sayuran dan tanaman obat di masa yang akan datang.

5. Pengembangan Sistem Informasi Sayuran dan Tanaman Obat

Pemanfaatan teknologi informasi perlu digalakkan untuk mensejajarkan hortikultura Indonesia dengan hortikultura dunia yang telah lebih dulu membangun daya saingnya. Penerapan teknologi informasi dalam pembangunan sayuran dan tanaman obat merupakan salah satu terobosan untuk menghimpun *database* dan mempercepat aliran informasi untuk pengambilan keputusan.

Sistem informasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan sayuran dan tanaman obat . Hal tersebut sangat penting untuk memfasilitasi para pelaku usaha dalam mengakses data dan informasi terkini mengenai ketersediaan produk sayuran, permintaan dan kebutuhan produk sayuran, distribusi dan pemasarannya. Pengembangan sistem informasi bertujuan untuk menghimpun *database* terkait dengan kegiatan Direktorat Sayuran dan

Tanaman Obat, dengan demikian simpul-simpul penyedia informasi pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional dapat disatukan dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Data dan informasi berkembang sangat pesat di era digital dan era transparansi informasi. Kegiatan sayuran dan tanaman obat perlu berkembang ke arah daya saing yang mengoptimalkan fungsi dan peran teknologi informasi pada utilisasi di lapang yang dapat digunakan dalam proses pengambilan kebijakan.

Peningkatan produksi dan produktivitas menjadi tugas pemerintah bersama dengan *stakeholder* sehingga memberi keyakinan akan jaminan pasokan dalam negeri dan untuk memberi memberikan nilai tambah produk serta ekspor. Teknologi informasi menjadi salah satu kunci dalam upaya produksi dan produktivitas untuk komoditas komersial yang memiliki pasar cukup baik.

6. Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi

Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian, merupakan prestasi yang sangat baik di tengah kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, sehingga diharapkan kesejahteraan petani meningkat seiring dengan meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian yang dapat dilihat dari nilai tukar petani. Pemerintah ingin meningkatkan bobot pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya di era pandemi Covid 19.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dalam menyusun perencanaan program pembangunan hortikultura memprioritaskan petani dan pelaku usaha hortikultura sebagai lokomotif penggerak dan pelopor yang inovatif, kreatif, profesional, mandiri, mampu bersaing, dan berwawasan global. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan hortikultura di antaranya adalah melalui Bimbingan Teknis untuk para Petani/Pelaku Usaha Hortikultura. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Sayuran dan Tanaman Obat dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas petani/pelaku usaha dan pendampingan intensif baik pada tahap pelaksanaan maupun aspek pendanaan melibatkan berbagai institusi pemerintah, pelaku usaha dan swasta, sehingga dapat bergerak secara bersama dengan saling mendukung dan saling mengisi sesuai bidang tugas, potensi dan sumberdaya masing-masing. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dapat dilakukan secara *offline* maupun *online* sesuai dengan kebutuhan dan kondisi antara penyelenggara dan pesertanya.

7. Penerapan Sistem Pertanian Modern

Pemanfaatan teknologi maju diperlukan untuk merubah praktik pertanian yang konvensional yang tergantung pada iklim dan rutinitas produksi menjadi praktik pertanian yang terkendali dan terjadwal yang memberikan dampak kepada kepastian ketersediaan produk bagi konsumen dan kepastian usaha bagi petani. Petani harus melakukan perubahan pada manajemen agribisnisnya menjadi produksi yang terjadwal yang disesuaikan dengan permintaan konsumen, memilih jenis komoditas, memanfaatkan peralatan berteknologi maju dan melakukan transaksi melalui kontrak yang disepakati.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mendorong pengembangan dan penerapan teknologi maju yang dapat mendukung penerapan *smart farming* dan *integrated farming*. Pemanfaatan teknologi maju seperti *green house* modern, alat pengolah tanah, teknologi pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan, sistem pengairan dan suhu yang terkendali melalui suatu aplikasi, teknologi penyimpanan, dan teknologi distribusi pendingin. Penerapan *smart farming* diharapkan disertai dengan keluaran sertifikasi mutu bagi lembaga usaha tani sehingga dapat akses ke pasar modern dan ekspor.

8. Penerapan Sistem Pertanian Terpadu

Upaya mendorong pembangunan sayuran dan tanaman obat menjadi praktik pertanian yang terpadu dengan sub sektor pertanian lainnya yang dikenal sebagai *integrated farming* perlu dilakukan, misalnya praktik keterpaduan budidaya antara hortikultura-tanaman pangan-peternakan dan atau juga dengan perkebunan. Pemberdayaan peran kelembagaan petani sayuran dan tanaman obat juga diharapkan dapat memadukan pengelolaan ketersediaan kebutuhan sarana produksi, penjadwalan produksi, penanganan pascapanen hingga penataan pemasaran.

Keterpaduan pengelolaan dari aspek hulu hingga hilir akan menguatkan daya saing petani dan mendekatkan produsen dengan konsumen. Pertanian yang terpadu (*integrated farming*) dapat memberikan kelebihan dalam ketahanan keluarga petani dalam mendapatkan tambahan pendapatan serta kemandirian pemenuhan kebutuhan pokok pangan bagi anggota keluarga. Melalui sistem pertanian terpadu, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat berperan serta dalam mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lainnya.

9. Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan

Keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya sayuran dan tanaman obat tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan oleh pemerintah pusat. Dukungan dan kerja sama pemerintah daerah sangat mengambil peran dalam keberhasilan tersebut, karena secara umum subjek dan objek pertanian berada pada ranah kewenangan pemerintah daerah. Penyamaan visi misi serta persepsi pembangunan hortikultura harus sejalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Harmonisasi dan sinergitas kebijakan antar Kementerian/Lembaga, instansi pendukung permodalan, BUMN, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertanian ataupun industri pengolahan produk-produk hortikultura sangat diperlukan dalam keberhasilan program. Selain itu, diperlukan kegiatan yang fokus pada pengembangan kawasan yang terintegrasi seperti konsep *smart farming* sayuran dan tanaman obat.

Pengembangan oleh APBN juga perlu didukung oleh pembiayaan dari sumber lain seperti investasi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun pembiayaan berbunga rendah seperti skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan model pembiayaan lainnya. Sektor perbankan maupun korporasi yang tertarik untuk mengembangkan hortikultura perlu disertakan dalam pengembangan sayuran dan tanaman obat di setiap aspek yang dipandang komersial bagi petani dan memiliki potensi keberlanjutan yang sangat besar.

Optimasi pembiayaan dari non-reguler didukung oleh pendampingan kepada petani agar petani dapat meningkatkan skala usaha dan perekonomian wilayah mendapat manfaat positif dari pengembangan sayuran dan tanaman obat. Petani sayuran dan tanaman obat perlu mendapat bimbingan dalam mengakses berbagai skema ini dan perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya untuk dapat memenuhi standar mitra usaha pendanaan. Penguatan institusi petani dilakukan secara berjenjang menurut kondisi dan kapasitas institusi petani sehingga membentuk institusi usaha yang tangguh dan berkesinambungan.

Selain itu, kerjasama dan sinergitas kebijakan dengan berbagai instansi/ sektor BUMN serta swasta sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura, misalnya dalam pengembangan tanaman sayuran dan tanaman obat di daerah Perhutani atau pengembangan cluster kawasan hortikultura dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbenihan ataupun pengolahan hasil hortikultura.

10. Pengendalian Inflasi

Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah merupakan salah satu kegiatan strategis untuk penyediaan pasokan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara agregat volume produksi tahunan cabai dan bawang merah nasional terhitung mencukupi, namun sebaran antar- waktu dan antar-wilayah masih perlu mendapat perhatian ekstra dari stakeholder terkait. Terlebih pada momentum hari besar keagamaan nasional dan perayaan nasional lainnya yang berpotensi memicu peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap cabai dan bawang merah. Jika langkah-langkah mitigasi dan pengendalian tidak dilakukan sedemikian rupa, akan rentan memicu kenaikan inflasi nasional. Langkah-langkah tepat dan taktis perlu dilakukan guna mengantisipasi dan mengendalikan inflasi terutama yang dipicu oleh fluktuasi harga cabai dan bawang merah.

11. Kemitraan Champion Mendukung Stabilisasi Pasokan Aneka Cabai dan Bawang Merah

Upaya khusus diperlukan untuk pengelolaan pasokan cabai dan bawang merah agar mampu memenuhi kebutuhan sepanjang tahun dan menekan inflasi, salah satunya dengan melibatkan tokoh-tokoh petani di berbagai wilayah sentra produksi. Tokoh-tokoh yang selanjutnya dikenal sebagai “Champion” tersebut adalah sosok yang dinilai memiliki pengalaman dan keterampilan mengelola agribisnis baik aspek budidaya, pascapanen hingga pemasaran. Selain itu Champion juga dipandang memiliki komitmen dan kapasitas guna mendukung program Direktorat Jenderal Hortikultura dengan mengkoordinasikan kelompok tani/gapoktan dan stakeholder terkait pengembangan cabai dan bawang merah di wilayah masing-masing. Peran strategis Champion tersebut dapat dielaborasi sedemikian rupa guna mendukung upaya stabilisasi pasokan cabai dan bawang merah antar waktu dan antar wilayah.

2.8 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk memberikan acuan dan arahan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban, transparansi dan akuntabilitas Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Sedangkan sasarannya adalah pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan mengacu kepada aturan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat TA 2025 efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari rencana strategis dan perjanjian kinerja serta bertujuan untuk memberikan acuan dan arahan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban, transparansi dan akuntabilitas Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

RKT memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target yang akan dicapai, serta program dan kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2025 yang mengacu pada struktur output pada DIPA Tahun Anggaran 2025. Sasarannya adalah pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan mengacu kepada aturan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat TA 2025 efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berisi indikator kegiatan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat pada tahun 2025. Di dalam RKT telah ditetapkan target-target yang akan dijadikan ukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai. RKT Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025

Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan	Indikator		Target
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura			
Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri			
Terpenuhinya kebutuhan pangan asal hortikultura dari produksi dalam negeri	1	Pekarangan Hortikultura (Kelompok Masyarakat)	13.500
Meningkatnya produksi aneka cabai dan bawang putih	1	Kawasan Aneka Cabai (Ha)	40
	2	Kawasan Bawang Putih (Ha)	20

Sumber: RKT Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025

2.9 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara pimpinan unit tertinggi beserta jajarannya. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat telah menetapkan dokumen PK yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura dengan Direktur Sayuran dan Tanaman Obat. Dalam dokumen PK tercantum beberapa “Indikator Kinerja” yang harus dicapai oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat selama tahun 2025.

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mengalami 7 kali perubahan akibat adanya perubahan anggaran dan penambahan indikator kinerja. Anggaran pada Perjanjian Kinerja awal adalah Rp. 186.684.375.000,- yang ditandatangani pada bulan Desember 2024. Kemudian dengan adanya revisi anggaran, maka dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja pertama pada bulan Maret 2025. Selanjutnya revisi kedua pada bulan Mei 2025 terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 190.022.374.000,-. Terjadinya revisi ketiga perubahan anggaran pada bulan Juni 2025 menjadi Rp.189.474.774.000,-. Terjadi revisi keempat Perubahan Nama Pejabat/ Direktur pada bulan Juli 2025 menjadi Dr. Muhammad Agung Sunusi, SP, M,Si dan perubahan anggaran menjadi Rp 184.063.001 .000,-. Revisi kelima terjadi perubahan anggaran pada bulan Agustus menjadi Rp. 182.262.645 000,-. Revisi keenam terjadi perubahan anggaran pada bulan September menjadi Rp. 185.550.333.000,- dan revisi ketujuh terjadi perubahan kinerja dari penilaian berdasarkan hasil produksi berubah menjadi penilaian berdasarkan luas panen pada bulan Desember. Perubahan data PK Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dari Produksi menjadi Luas Panen disebabkan karena menyesuaikan dengan dokumen perencanaan / renstra 2025-2029 yang ada. Perjanjian Kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2025 revisi 7 disajikan pada Lampiran 2.

Kinerja Direktorat Sayuran dan Tanam Obat, dapat dicapai oleh dukungan berbagai pihak, baik anggaran pembangunan berupa APBN maupun dukungan dari pelaku usaha atau petani secara swadaya. Dukungan anggaran pembangunan APBN melalui pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat hanya merupakan stimulan mengingat adanya efisiensi anggaran. Dukungan anggaran APBN Tahun 2025 hanya untuk pengembangan sayuran yaitu kegiatan pekarangan hortikultura, kawasan aneka cabai, dan kawasan bawang putih. Jadi, tidak ada untuk tanaman obat. Peran serta masyarakat dan petani, serta sektor swasta sangat dibutuhkan dalam pengembangan sayuran dan juga tanaman obat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Ukuran keberhasilan kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat TA. 2025 dapat diketahui dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian kinerja yang diukur dengan keberhasilan pencapaian *outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat 2025.
2. Capaian kinerja diukur dari realisasi volume output dibandingkan dengan target dalam RKT.
3. Efisiensi kinerja.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2025 digunakan metode *scoring*. Metode tersebut mengelompokkan capaian kinerja ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%), 2) berhasil (capaian 80 - 100%), 3) cukup berhasil (capaian 60 - 79%), dan 4) kurang berhasil (capaian < 60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung penghematan anggaran dalam mencapai output kegiatan dengan rumus Analisis Efisiensi. Rumus Analisis Efisiensi yang digunakan sebagai berikut :

Parameter keberhasilan kinerja juga diukur dari efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini besarnya anggaran yang digunakan untuk mencapai target output kegiatan dan nilai efisiensi. Pengukuran efisiensi sumber daya Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Perlu disampaikan pula bahwa pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian output program atau capaian Rincian Output (RO) yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E_{OP}	: Efisiensi Output Program
$AA \text{ Program}_i$	: Alokasi Anggaran Program i
$RA \text{ Program}_i$	: Realisasi Anggaran Program i
COP_i	: Capaian Output Program i
n	: jumlah program pada suatu unit Eselon I

Namun demikian efisiensi ini tidak memiliki skala 0%-100%. Untuk itu perlu dilakukan penghitungan nilai efisiensi yang diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Untuk mendapatkan nilai efisiensi dalam skala 0 – 100% maka perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

dimana :

NE = Nilai efisiensi

E = Efisiensi

Semakin sedikit anggaran untuk mencapai output maksimal berarti nilai efisiensi semakin tinggi, atau dapat dikatakan kalau rasio penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu satuan capaian output kegiatan berarti penggunaan anggaran efisien.

3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025

3.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025 diukur dari capaian outcomenya sesuai PK Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025 (Tabel 2). Capaian Kinerja ini berbeda dengan capaian sebelumnya yang berdasarkan produksi (ton) menjadi berdasarkan luas panen (ha) yaitu luas panen habis dan luas panen belum habis, serta adanya penambahan indikator kinerja baru. Indikator kinerja yang digunakan dalam periode 5 tahun ke depan (2025-2029) adalah rata-rata luas panen komoditas sayuran prioritas (aneka cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, bawang daun, tomat, sawi, jamur, wortel), rata-rata luas panen tanaman obat prioritas (jahe, kunyit, kapulaga), dan peningkatan luas panen hortikultura KSPP Sumatera Utara, serta tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Tabel 2. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target*	Realisasi**	Capaian (%)	Kategori
1. Terpenuhinya Luas Panen Komoditas Sayuran dan Tanaman Obat Prioritas	Rata-Rata Luas Panen 1. Komoditas Sayuran Prioritas (ha)	93.383	91.351	97,82	Berhasil
	Rata-Rata Luas Panen 2. Komoditas Tanaman Obat Prioritas (ha)	7.031	6.169	87,73	Berhasil
2. Tercapainya Luas Panen Komoditas Hortikultura Prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara (ha)	1.700	659	38,76	Kurang Berhasil
3. Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (Skala Likert)	3,25	3,32	102,15	Sangat Berhasil

Keterangan:

*) Berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dit. Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025

**) Berdasarkan Data SPH 23 Januari 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja berdasarkan pencapaian luas panen tahun 2025, maka pencapaian indikator kinerja Rata-Rata Luas Panen Komoditas Sayuran Prioritas dan Rata-Rata Luas Panen Komoditas Tanaman Obat Strategi masuk kategori “Berhasil” dengan capaian masing-masing sebesar 97,82 % dan 87,73 %. Untuk pencapaian Peningkatan Luas Panen Hortikultura Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Sumatera Utara sangat kecil dengan capaian sebesar 38,76% sehingga masuk kategori kurang “Kurang Berhasil”, namun untuk

tingkat kepuasan pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat melampaui target dengan capaian 102,15% dan masuk kategori “Sangat Berhasi”.

Hasil pencapaian luas panen sayuran dan tanaman obat merupakan dukungan kegiatan dan anggaran dana APBN, pelaku usaha dan swadaya masyarakat. Capaian luas panen komoditas sayuran strategis dan tanaman obat strategis, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tersaji pada Tabel 2.

3.2.1.1. Pencapaian Luas Panen Komoditas Sayuran Prioritas

Pencapaian luas panen komoditas sayuran proritas terdiri dari aneka cabai (cabai besar dan cabai rawit), bawang merah, bawang putih, kentang, bawang daun, tomat, sawi/petsai, wortel dan jamur menggunakan Angka Tetap dari Statistika Pertanian Hortikultura (SPH) tahun 2021-2024, sedangkan data tahun 2025 menggunakan data Angka Sangat Sementara yang diakses pada tanggal 23 Januari 2026.

Tabel 3. Rata-Rata Luas Panen Komoditas Sayuran Prioritas 5 (Lima) Tahun Terakhir

No	Komoditas Sayuran Prioritas (hektar)	Luas Panen Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025*)
1	Aneka Cabai	321.923	334.545	338.636	330.218	350.553
2	Bawang Merah	194.575	184.984	181.683	188.796	186.711
3	Bawang Putih	6.868	4.271	5.341	5.318	4.511
4	Kentang	71.786	76.728	63.606	67.488	67.758
5	Bawang Daun	61.677	63.168	58.205	58.168	56.299
6	Tomat	59.401	63.369	61.255	58.995	54.922
7	Sawi/Petsai	69.626	71.390	69.190	68.944	66.113
8	Wortel	37.106	39.098	34.613	37.163	35.033
9	Jamur	413	310	270	243	257
Rata-rata		91.486	93.096	90.311	90.593	91.351

Sumber: Angka SPH Tahun 2021-2025 (Angka Tetap)

*) SPH Angka Sementara, SPH SBS 23 Januari 2026

Berdasarkan Tabel 3 luas panen tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 pada komoditas, bawang merah, bawang putih, bawang daun, tomat, sawi/petsai, dan wortel mengalami penurunan luas panen. Hal-hal yang banyak mempengaruhi turunannya angka tersebut salah satunya pengaruh curah hujan yang tinggi sehingga tanaman mudah muncul hama penyakit,

dan alih fungsi lahan pertanian. Selanjutnya luas panen yang mengalami kenaikan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu komoditas jamur (jamur tiram, jamur merang dan jamur lainnya) dan kentang. Peningkatan luas panen jamur disebabkan karena minat yang cukup banyak masyarakat untuk konsumsi jamur pangan, sehingga banyak bermunculan petani jamur skala rumah tangga maupun perusahaan. Kelebihan dari budidaya jamur tiram dan jamur merang mudah untuk dibudidayakan di lingkungan dataran rendah maupun dataran rendah. Sedangkan peningkatan luas panen kentang antara lain disebabkan meningkatnya kebutuhan kentang di masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan kentang olahan seperti kripi kentang (*potato chips*) dan kentang goreng (*french fries*).



*) SPH Angka Sementara, SPH SBS 23 Januari 2026

Gambar 2. Luas Panen Komoditas Sayuran Strategis Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 2. Rata-rata luas panen komoditas sayuran prioritas yang terdiri dari 9 komoditas, yaitu aneka cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, bawang daun, tomat, sawi/petsai, wortel dan jamur pada tahun 2025 sebesar 91.351 Ha dan mengalami penurunan (2,65 %) dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 90.593 ha.

Tabel 4. menampilkan angka persentase kenaikan/penurunan luas panen dalam 5 tahun terakhir apabila dibandingkan dengan luas panen tahun sebelumnya. Angka kenaikan luas panen pada tahun 2025 yang paling besar adalah untuk komoditas aneka cabai yaitu sebesar 6,15 %, sedangkan penurunan luas panen yang paling besar terjadi pada komoditas bawang putih yaitu sebesar 15,17 %.

Tabel 4. Persentase Kenaikan/ Penurunan Luas Panen Komoditas Sayuran Strategis dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

No	Komoditas	Satuan	Kenaikan/Penurunan Luas Panen (%)			
			2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025 *)
1	Aneka Cabai	Hektar	3,92	1,22	-2,48	6,15
2	Bawang Merah	Hektar	-4,93	-1,78	3,92	-1,10
3	Bawang Putih	Hektar	-37,82	25,05	-0,43	-15,19
4	Kentang	Hektar	6,88	-17,10	6,10	0,40
5	Bawang Daun	Hektar	2,42	-7,86	-0,06	-3,21
6	Tomat	Hektar	6,68	-3,33	-3,69	-6,90
7	Sawi/Petsai	Hektar	2,53	-3,08	-0,35	-4,10
8	Wortel	Hektar	5,37	-11,47	7,37	-5,73
9	Jamur	Hektar	-24,93	-12,90	-10,0	5,74

Sumber: Angka SPH Tahun 2021-2025 (Angka Tetap)

*) SPH Angka Sementara SPH SBS 23 Januari 2026

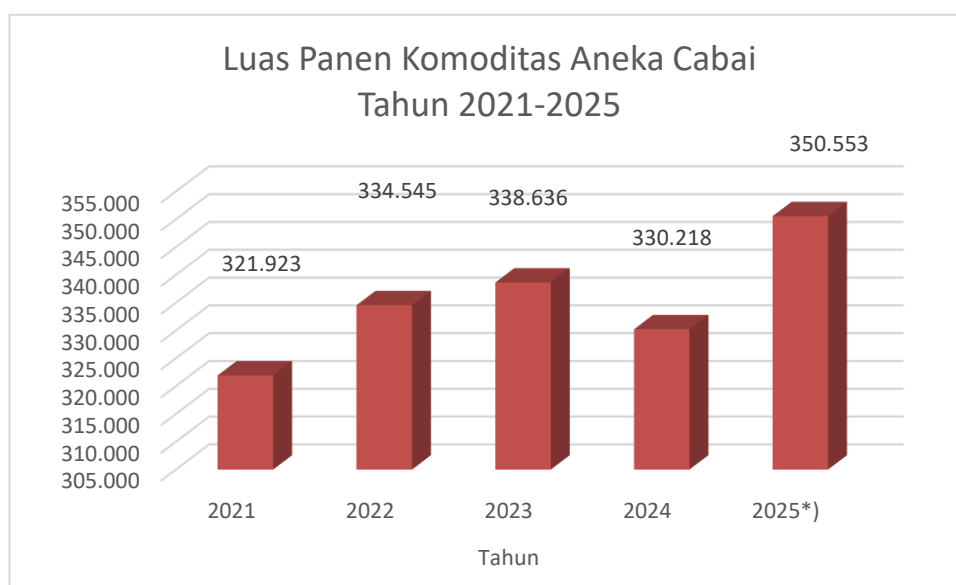
A. Luas Panen Komoditas Aneka Cabai Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 3, jumlah luas panen aneka cabai tahun 2025 sebesar 350.553 Ha mengalami penurunan luas panen (6,15%) dari tahun 2024 330.218 ha. Luas panen aneka cabai nasional cenderung mengalami penurunan pada tahun 2023-2024 dari 338.636 Ha menjadi 330.218 Ha pada tahun 2024 (turun 2,48 %) dan 350.553 Ha pada tahun 2025 (naik 6,15 %). Peningkatan luas panen aneka cabai nasional dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Luas Panen Komoditas Aneka Cabai Tahun 2021-2025
2. Secara nasional produktivitas aneka cabai mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat kenaikan produktivitas cabai rawit mencapai 0,3 ton/Ha (5%) dan cabai besar mencapai 1,4 ton/ha (14%) dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Kenaikan produktivitas ini akan berpengaruh pada kenaikan produksi. Kenaikan produksi sangat signifikan di beberapa wilayah sentra produksi. Kenaikan produksi untuk cabai rawit di beberapa wilayah sentra yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan. Kenaikan produksi untuk cabai besar di

beberapa wilayah sentra yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jambi, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Aceh.

4. Adanya program P2B (Pekarangan Pangan Bergizi) untuk penyediaan aneka cabai di pekarangan yang terlaksana 12.988 kelompok yang tersebar di 33 provinsi dengan alokasi jumlah polybag yang diterima kelompok 450 polybag/kelompok atau dengan luas panen 202,5 m² (asumsi produktivitas 0,5 kg/batang). Sehingga melalui kegiatan P2B bisa menambah luas panen aneka cabai sebanyak 263 Ha.

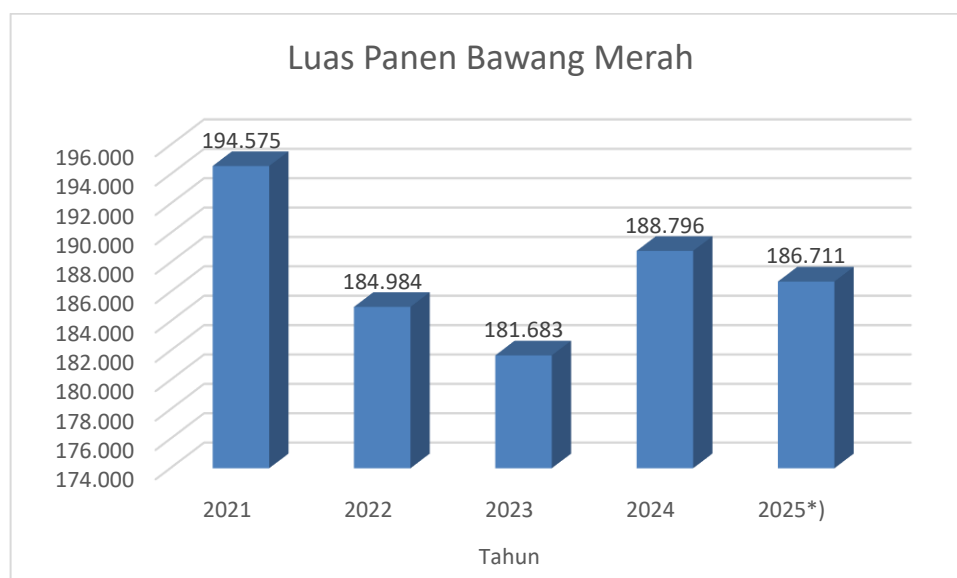


Gambar 3. Luas Panen Komoditas Aneka Cabai Tahun 2021-2025

B. Luas Panen Komoditas Bawang Merah Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 4, luas panen komoditas bawang merah tahun 2025 sebesar 186.711 Ha mengalami penurunan (1,1%) dibandingkan tahun 2024 sebesar 188.796 ha. Penurunan Luas Panen bawang merah nasional dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Sebagian Petani alih fungsi lahan dari tanaman bawang merah ke tanaman padi dan adanya harga jual padi lebih menguntungkan
2. Jadwal tanam yang mundur
3. Terjadinya bencana alam longsor dan banjir pada bulan November 2025 di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat (Kab Solok) seluas 710 ha dan menyebabkan puso 497 ha
4. Terjadinya bencana alam (banjir) kecamatan Wanasari Kab Brebes pada bulan November 2025 seluas 114 Ha dan pada bulan Desember di sentra tanaman bawang merah di Kabupaten Brebes pada 9 dan 12 desember yang berdampak pada pertanaman seluas 51 Ha dan Puso 4 ha dan 29 Desember 2025 yang berdampak pada pertanaman seluas 469 ha dan menyebabkan puso seluas 24,5 ha



Gambar 4. Luas Panen Komoditas Bawang Merah Tahun 2021-2025

C. Luas Panen Komoditas Bawang Putih Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 5, luas panen komoditas bawang putih tahun 2025 sebesar 4.511 Ha mengalami penurunan (15,17 %) dibandingkan tahun 2024 sebesar 5.318 ha. Penurunan Luas Panen bawang putih nasional dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pasar bawang putih selain untuk benih masih sangat terbatas

Sampai dengan saat ini pengembangan bawang putih sebagian besar masih berorientasi untuk benih. Sementara penetrasi ke pasar konsumsi masih sangat terbatas. Pasar konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh produk impor. Pengguna bawang putih lokal masih terbatas pada UMKM olahan, warung kaki lima dan industri mikro seperti pabrik kerupuk. Proses edukasi dan sosialisasi konsumsi bawang putih lokal masih sangat terbatas. sehingga minat masyarakat mengkonsumsinya juga masih rendah.

2. Harga pasar yang tidak mampu menjadi stimulus petani menanam kembali

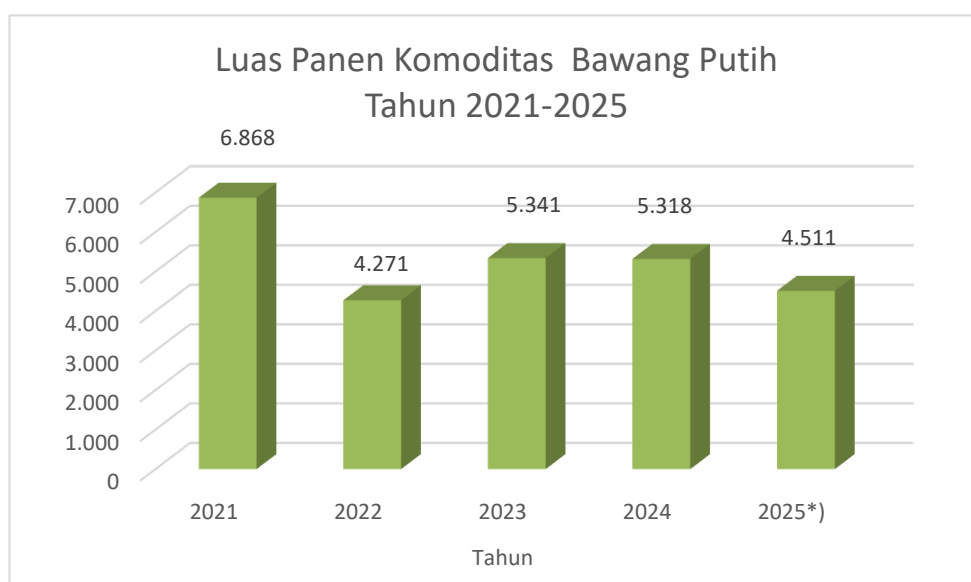
Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biayacsaprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober – Desember dengan waktu panen di bulan Februari - April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa tidak menarik bagi petani.

3. Adanya alih komoditas bawang putih ke komoditas lain

Harga jual bawang putih lokal yang kurang sebanding dengan biaya usaha tani menyebabkan banyak petani yang beralih komoditas dari bawang putih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Umur tanam sampai dengan panen yang mencapai rata-rata 4 bulan juga menyebabkan petani memilih komoditas lain yang lebih cepat dipanen (contoh bawang merah) atau bisa dipanen berulang seperti cabai, tomat, dan sebagainya

4. Program wajib tanam dan produksi

Program yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam. Program wajib tanam dan produksi sebagai salah satu bagian dari proses penerbitan RIPH bawang putih merupakan instrumen untuk mendorong peningkatan produksi di dalam negeri. Berdasarkan ketentuan, setiap pelaku usaha yang mendapatkan RIPH diwajibkan melaksanakan penanaman bawang putih di dalam negeri sekurangkurangnya menghasilkan produksi 5% dari total volume pengajuan RIPH. Adanya revisi Permentan 38 tahun 2018 menjadi Permentan 39/2019 dan Permentan 46/2019 berdampak signifikan terhadap dinamika produksi bawang putih nasional. Dalam ketentuan sebelumnya diwajibkan adanya penanaman awal sebesar 25% bagi pelaku usaha baru dan 10% untuk pelaku usaha lama sebagai syarat mendapatkan RIPH. Namun dengan adanya perubahan waktu pelaksanaan wajib tanam dari sebelum terbit RIPH menjadi setelah terbit RIPH pada praktiknya tidak mampu menciptakan kepatuhan para pelaku usaha melaksanakan kewajiban tanam dan produksi



Gambar 5. Luas Panen Komoditas Bawang Putih Tahun 2021-2025

D. Luas Panen Komoditas Kentang Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 6, luas panen komoditas kentang tahun 2025 sebesar 67.058 Ha mengalami penurunan (0,4 %) dibandingkan tahun 2024 sebesar 67.488 ha. Penurunan Luas Panen bawang putih nasional dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Curah hujan tinggi menyebabkan tingginya gangguan hama dan penyakit sehingga tanaman kentang mudah busuk
2. Petani beralih komoditas ke tanaman lainnya (tembakau) daripada tanaman kentang
3. Tidak adanya bantuan APBN dari tahun 2023-sekarang

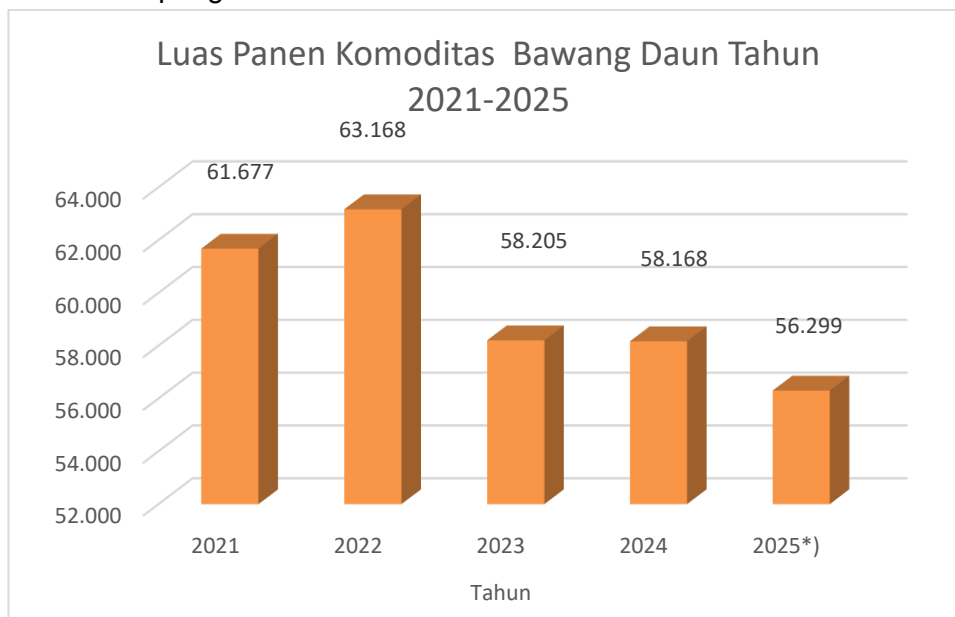


Gambar 6. Luas Panen Komoditas Kentang Tahun 2021-2025

E. Luas Panen Komoditas Bawang Daun Tahun 2021-2025

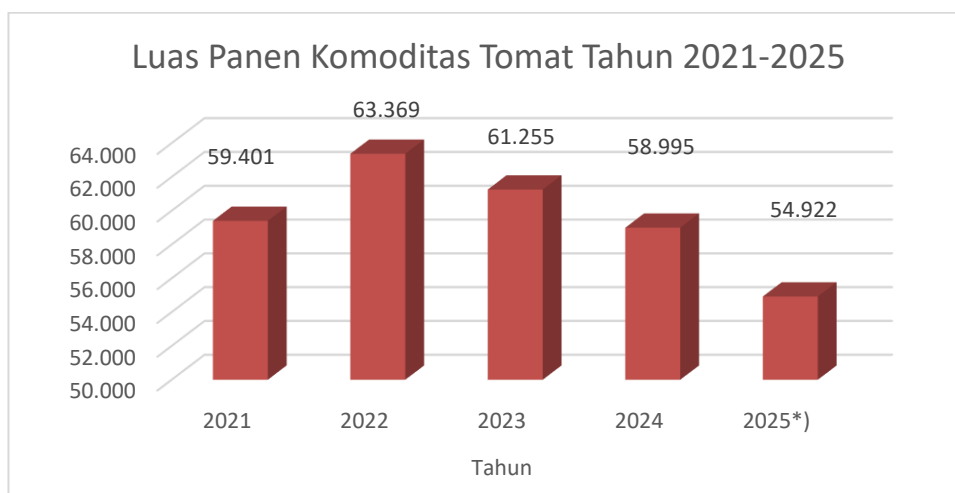
Berdasarkan Gambar 7, luas panen komoditas bawang daun tahun 2025 sebesar 56.299 Ha mengalami penurunan (3,21 %) dibandingkan tahun 2024 sebesar 58.168 ha. Penurunan luas panen bawang daun nasional dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Peralihan lahan ke komoditas lain terutama disebabkan harga yang rendah.
2. Curah hujan yang tinggi, menyebabkan banjir di beberapa tempat dan banyak juga tanaman yang rusak dan terkena serangan OPT.
3. Tidak adanya bantuan APBN dari tahun 2023 – sekarang sehingga tidak adanya pembinaan dilapangan.



Gambar 7. Luas Panen Bawang Daun Tahun 2021-2025

F. Luas Panen Komoditas Tomat Tahun 2021-2025

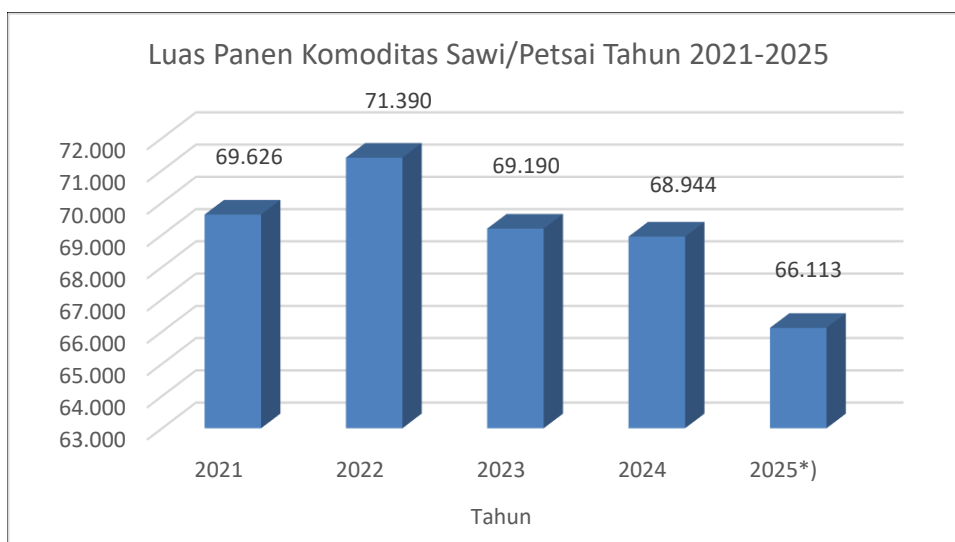


Gambar 8. Luas Panen Komoditas Tomat Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 8, luas panen komoditas tomat tahun 2025 sebesar 54,922 Ha mengalami penurunan (6,90 %) dibandingkan tahun 2024 sebesar 58.995 ha. Penurunan Luas Panen tomat nasional dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanaman tomat mudah rusak dan adanya gangguan hama dan penyakit
2. Harga yang cenderung rendah menyebabkan Petani berkurang untuk tanam tomat
3. Alih fungsi lahan ke tanaman lainnya di wilayah dataran tinggi sehingga berkurangnya luas tanam komoditas tomat

G. Luas Panen Komoditas Sawi/Petsai Tahun 2021-2025

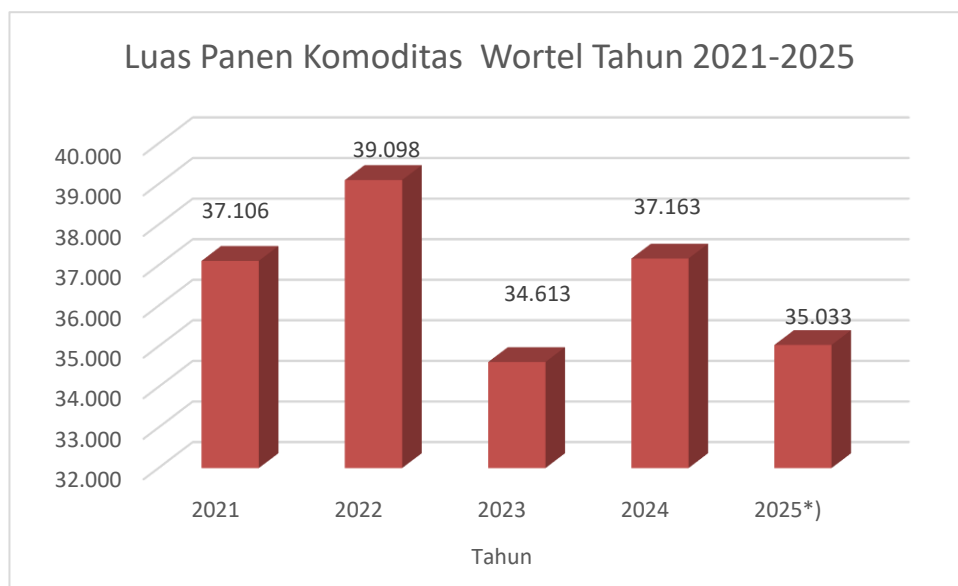


Gambar 9. Luas Panen Sawi/Petsai Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 9. luas panen komoditas sawi/petsai tahun 2025 sebesar 66.113 Ha mengalami penurunan (4,10 %) dibandingkan tahun 2024 sebesar 68.944 ha. Penurunan Luas Panen sawi/petsai nasional dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Peralihan lahan ke komoditas lain terutama disebabkan harga yang rendah.
2. Curah hujan yang tinggi, menyebabkan banjir di beberapa tempat sentra sayuran sehingga banyak juga tanaman yang rusak dan terkena serangan penyakit.
3. Tidak adanya bantuan APBN dari tahun 2023 – sekarang sehingga tidak adanya pembinaan dilapangan.

H. Luas Panen Komoditas Wortel Tahun 2021-2025

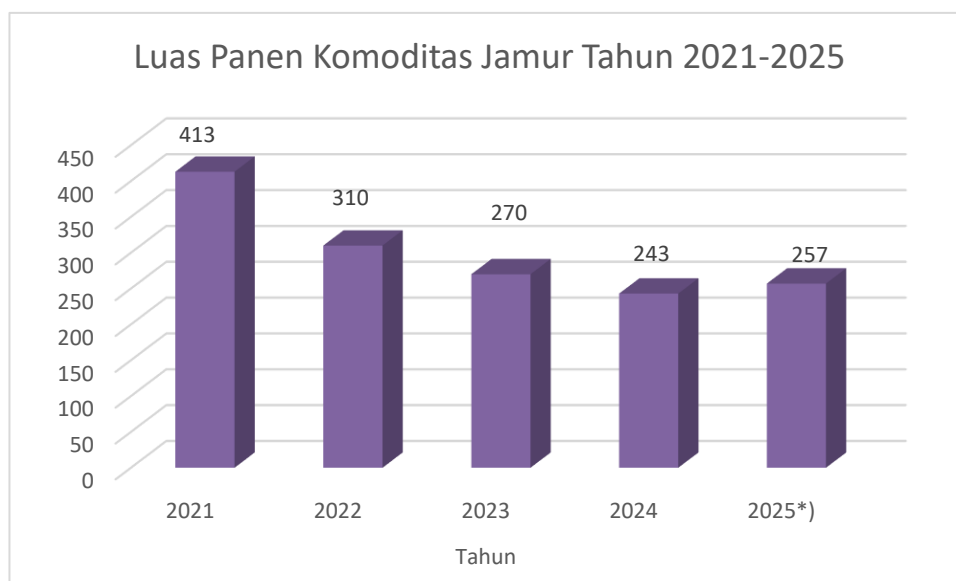


Gambar 10 . Luas Panen Komoditas Wortel Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 10. luas panen komoditas wortel tahun 2025 sebesar 35.033 Ha mengalami penurunan (5,73 %) dibandingkan tahun 2024 sebesar 37.163 ha. Penurunan Luas Panen wortel nasional dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Adanya cuaca ekstrim (curah hujan tinggi) menyebabkan tanaman mudah terkena hama dan penyakit.
2. Alih fungsi lahan untuk komoditas lainnya dengan harga lebih tinggi.

I. Luas Panen Komoditas Jamur Tahun 2021-2025



Gambar 11. Luas Panen Komoditas Jamur Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 11. luas panen komoditas Jamur tahun 2025 sebesar 257 Ha mengalami penurunan (5,74 %) dibandingkan tahun 2024 sebesar 243 ha.

mengalami peningkatan (22,94 %) dibandingkan tahun 2024 sebesar 203,14 ha. Peningkatan Luas Panen jamur nasional disebabkan tingginya permintaan konsumen, potensi pasar yang luas, dan diversifikasi olahan produk. Meningkatnya permintaan jamur di masyarakat disebabkan adanya kombinasi faktor kesehatan, ekonomi, dan gaya hidup.

3.2.1.2. Pencapaian Luas Panen Komoditas Tanaman Obat Strategis

Pencapaian luas panen Komoditas Tanaman obat strategis diperoleh dari data Statistika Pertanian Hortikultura (SPH) tahun 2021-2024 menggunakan data Angka Tetap (ATAP) dan data tahun 2025 menggunakan data Angka Sementara (ASEM). Komoditas Tanaman obat strategis terdiri dari jahe, kunyit dan kapulaga.

Tabel 5. Rata-Rata Luas Panen Komoditas Tanaman Obat Strategis 5 (Lima) Tahun Terakhir

No	Komoditas Tanaman Obat Prioritas	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025*)
1	Jahe	Hektar	10.610	10.409	8.343	7.492	6.353
2	Kunyit	Hektar	7.354	7.556	8.334	7.174	5.837
3	Kapulaga	Hektar	5.690	6.175	6.044	6.397	6.316
Total		Hektar	23.653	24.140	22.722	21.063	18.505
Rata-Rata Luas Panen		Hektar	7.884	8.047	7.574	7.021	6.168

Sumber: Angka SPH Tahun 2021-2025 (diolah)

*) SPH Angka Sementara 23 Januari 2026

Berdasarkan tabel 5. Realisasi rata- rata luas panen komoditas tanaman obat strategis 5 (Lima) tahun terakhir luas panen total tanaman obat tahun 2025 sebesar 6.168 Ha atau tercapai 87,73 % dari target dalam Perjanjian Kinerja Direktur sebesar 7.031 Ha untuk total luas panen jahe, kunyit dan kapulaga sehingga dapat dikatakan berhasil. Penyumbang luas panen terbesar adalah dari komoditas kapulaga. Hasil pencapaian luas panen komoditas tanaman obat strategis ini merupakan kegiatan swadaya masyarakat (petani).

Tabel 6. Persentase Kenaikan/ Penurunan Luas Panen Komoditas Tanaman Obat Strategis Dalam Periode 5 (Lima) Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Luas Penen	Satuan	Kenaikan/Penurunan Luas Panen (%)			
			2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024	2024 - 2025*)
1	Jahe	Hektar	-1,89	-19,84	-10,2	-15,2
2	Kunyit	Hektar	2,73	10,30	-13,93	-18,63
3	Kapulaga	Hektar	8,52	-2,11	5,84	-1,27
Rata-rata		Hektar	2,06	-5,87	-7,30	12,14

Sumber: Angka SPH Tahun 2021-2025 (diolah)

*) SPH Angka Sementara 23 Januari 2026

Tabel 6. menampilkan angka persentase kenaikan/penurunan luas panen dalam 5 tahun terakhir apabila dibandingkan dengan luas panen tahun sebelumnya. Angka penurunan luas panen pada tahun 2025 yang paling besar adalah untuk komoditas Kunyit yaitu sebesar 18,63 % dan diikuti oleh komoditas jahe sebesar 15,2 %. Penurunan Luas Panen tanaman obat jahe dan kunyit dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Banyak petani yang kurang memahami teknik budidaya yang baik sesuai SOP/ GAP, teknik pengelolaan OPT, dan pemupukan sehingga kualitas kurang bisa bersaing dipasaran.

2. Harga yang cenderung murah sehingga petani sering rugi terutama pada saat panen raya. Petani jahe dan kunyit banyak yang tidak memanen tanaman mereka dan membiarkan rimpang di dalam tanah/lahan sambil menunggu harga membaik.
3. Akses pasar yang masih terbatas terutama untuk ke Industri yang berkaitan dengan penggunaan bahan baku tanaman obat seperti jahe dan kunyit dan kapulaga.
4. Masih kurangnya sarana pendukung panen dan pascapanen seperti fasilitas pengeringan dan penyortiran modern.
5. Belum ada kegiatan khusus untuk pengembangan kawasan Jahe, kunyit dan kapulaga sejak tahun 2024 sampai sekarang sehingga tidak adanya pembinaan dilapangan

A. Rata-Rata Luas Panen Komoditas Tanaman Obat Tahun 2021-2025



Gambar 12. Luas Panen Komoditas Tanaman Obat Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 12. Luas panen komoditas tanaman obat terdiri dari nilai rata-rata Luas Panen dari 3 komoditas Jahe, Kunyit dan Kapulaga pada tahun 2025 sebesar 6.168 Ha mengalami penurunan (12,14 %) dibandingkan tahun 2024 sebesar 7.021 ha.

3.2.1.3 Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara

Salah satu sasaran dari Perjanjian Kinerja Direktur Tahun 2025 adalah Tercapainya Luas Panen Komoditas Hortikultura Prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian dengan indikator kinerja “Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara”. Target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja adalah 1.700 ha.

Komoditas tanaman yang dihitung dalam PK Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara tersebut adalah semua komoditas aneka sayuran baik yang smeusim maupun tahunan, yaitu bawang daun, bawang merah, bawang putih, bayam, buncis, aneka cabai, jamur, kacang panjang, kangkung, kembang kol, kentang, kubis, labu siam, mentimun, paprika, petsai.sawi, terung, tomat, wortel, jengkol, melinjo, dan petai di kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengan dan Tapanui Utara. Berdasarkan data Sipedas, total luas tanam pada tahun 2024 adalah sebesar 22.830,79 dan data pada tahun 2025 yang ditarik pada tanggal 26 Januari 2026 adalah 23.489,65 ha. Berdasarkan data tersebut, maka kenaikan luas panen adalah sebesar 658,86 ha. Data disajikan pada Tabel 1.

Tabel 7. Data Luas Panen KSPP Sumatera Utara Tahun 2024 dan 2025

No	Komoditas	Luas Panen (hektar)										Peningkatan
		HUMBAHAS (ha)		PHAKPAK BARAT (ha)		TAPANULI TENGAH		TAPANULI UTARA		Total		
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
1	Bawang Daun	117,00	121,0	7,16	8,11	0	0	252,25	293,20	376,41	422,3	45,90
2	Bawang Merah	410,00	387,5	16,45	10,5	0	0	198,39	223,16	624,84	621,2	- 3,68
3	Bawang Putih	1,00	10,0	0	0	0	0	0	-	1,00	10,0	9,00
4	Bayam	29,50	22,0	5,05	3,02	55	47	202,1	215,70	291,65	287,7	- 3,93
5	Buncis	234,00	243,0	13,19	4,83	0	0	534	399,40	781,19	647,2	- 133,96
6	Cabai Besar/ TW / Teropong	-	0,0	8,25	0	0	0	0	-	8,25	0,0	- 8,25
7	Cabai Keriting	2.623,10	2678,5	349,81	335,08	169	93	3604,35	3.674,65	6.746,26	6781,2	34,97
8	Cabai Rawit	2.028,30	2241,0	365,76	315,64	147	87	1444,44	2.023,76	3.985,50	4667,4	681,90
9	Jamur (Group)	-	0,0	0,0139	0	0	0	0	-	0,01	0,0	- 0,01
10	Kacang Panjang	33,00	31,5	16,52	7,95	137	108	477,6	386,40	664,12	533,9	- 130,27
11	Kangkung	31,50	30,5	4,11	4,02	50	48	198,15	210,85	283,76	293,4	9,61
12	Kembang Kol	85,00	91,5	1,93	0,67	0	0	157,2	210,40	244,13	302,6	58,44
13	Kentang	400,90	384,0	1,8	0,08	0	0	244,5	252,95	647,20	637,0	- 10,17
14	Kubis	439,40	379,0	4,8	2,64	0	0	226,06	294,15	670,26	675,8	5,53
15	Labu Siam	40,00	40,0	29,95	36,82	0	0	1331,92	1.055,20	1.401,87	1132,0	- 269,85
16	Mentimun	45,00	23,5	9,5	6,52	0	0	406,97	335,45	461,47	365,5	- 96,00
17	Paprika	-	0,0	0	0	0	0	0	-	-	0,0	-
18	Petsai/Sawi	157,50	158,0	21,46	16,79	0	0	361,7	360,70	540,66	535,5	- 5,17
19	Terung	211,20	483,5	30,36	11,13	109	51	865,85	604,90	1.216,41	1150,5	- 65,88
20	Tomat	1.428,00	1710,0	17,61	15,43	0	0	1426,53	1.596,80	2.872,14	3322,2	450,09
21	Wortel	88,10	103,0	0,08	0	0	0	171,5	194,00	259,68	297,0	37,32
22	Jengkol	-	-	40,67	58,37	-	-	158,43	149,89	199,10	208,3	9,16
23	Melinjo	57,1	111,8	-	-	-	-	-	-	57,10	111,8	54,74
24	Petai	56,9	64,03	66,14	64,03	167,60	147,75	207,19	211,34	497,78	487,2	- 10,63
Total										22.830,79	23.489,65	658,86

Angka peningkatan luas tanam dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 658,86 ha dan target di dalam PK adalah 1.700 ha, maka capaian kinerjanya adalah 38,76% atau kurang berhasil seperti yang disajikan pada Tabel 7.

Indikator kinerja Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara adalah indikator baru atau belum pernah ada sebelumnya. Angka target peningkatan luas panen tersebut terlalu tinggi karena program atau kegiatan dan anggaran yang mendukung selama ini hampir tidak ada. Pada tahun 2024 tidak ada APBN yang mendukung kegiatan ini, sementara pada tahun 2025 kegiatan APBN hanya ada di kabupaten Humbang Hasundutan untuk pengembangan bawang putih seluas 40 ha. Bawang putih yang dikembangkan tersebut baru bisa dipanen pada tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, kegiatan yang dilakukan selama ini adalah kerjasama dan kemitraan dengan perusahaan seperti PT Indofood, IT Del, PT Calbe Wings, Porlak Jahe Humbang, dan Codian Sinar Sinergi. Kegiatan tersebut baru ada di 2 kabupaten, yaitu kabupaten Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat. Berdasarkan laporan dari Tenaga Ahli Food Estate Bidang Hortikultura, luas panen hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat adalah seluas 132,23 ha.

Permasalahan dalam Capaian Kinerja peningkatan luas panen KSPP Sumatera Utara:

1. Badan Otorita Pengelola Kawasan KSPP Sumut yang tugasnya melaksanakan pembangunan dan pengembangan KSPP Sumut belum terbentuk sampai saat ini. Pembentukan Badan Otorita ini diamanatkan oleh Perpres 131 tahun 2024.
2. Angka target peningkatan luas panen KSPP Sumatera Utara tahun 2025 sangat besar, sementara Badan Otorita Pengelola Kawasan KSPP Sumut belum terbentuk.
3. Tidak adanya anggaran APBN yang khusus untuk KSPP Sumatera Utara.
4. Sedikitnya perusahaan swasta atau investor yang melakukan usaha budidaya. Hal ini disebabkan banyak faktor diantaranya dalam hal penyewaan lahan, misalnya perusahaan/investor menginginkan sewa lahan dalam jangka panjang di atas 20 tahun, sementara petani sebagai pemilik lahan hanya menginginkan sewa dalam jangka pendek 2-5 tahun.
5. Perlunya melakukan upaya-upaya untuk percepatan kegiatan KSPP Sumatera Utara agar program dapat berjalan sesuai rencana dan target kinerja direktur pada tahun berikutnya dapat tercapai.

3.2.1.4. Tingkat Kepuasan Pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Terhadap Layanan Ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan hortikultura diarahkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan untuk terciptanya Good Governance dan membangun hortikultura yang maju, mandiri dan modern. Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem

manajemen yang handal dalam pencapaian tujuan pembangunan hortikultura adalah dengan membangun Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi nasional dan tujuan organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura. Perlu adanya dukungan manajemen di setiap Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura

Kegiatan Pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat sayuran dan Tanaman Obat dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat merupakan kegiatan yang mendukung semua kegiatan yang terdapat pada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Kegiatan pengelolaan manajemen ketatausahaan ini terdiri dari beberapa tugas yaitu : melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, persuratan, dan kersipan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat diatur dalam "Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian"

Sasaran kinerja "Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat yang efektif, efisien dan akuntabel" di nilai dengan indikator kepuasan pelayanan tata usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Metode pengukuran indikator ini mengacu pada metode pengukuran tingkat kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index*) dengan cara survei menggunakan kuesioner yang mencakup 5 (lima) dimensi terdiri dari:

- a) Berwujud (tangibles),
- b) Keandalan (reliability),
- c) Daya Tanggap (responsive),
- d) Kepastian (assurance),
- e) Empati (emphaty).

Survei yang dilakukan tahun 2024 dilakukan secara online menggunakan aplikasi webform. Survei membandingkan tingkat kepentingan atau harapan dengan tingkat kepuasan atas layanan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat secara umum, dengan menggunakan skala likert 1-4 yaitu:

- 1 = sangat tidak penting/sangat tidak puas,
- 2 = tidak penting/tidak puas,
- 3 = penting/puas,
- 4 = sangat penting/sangat puas.

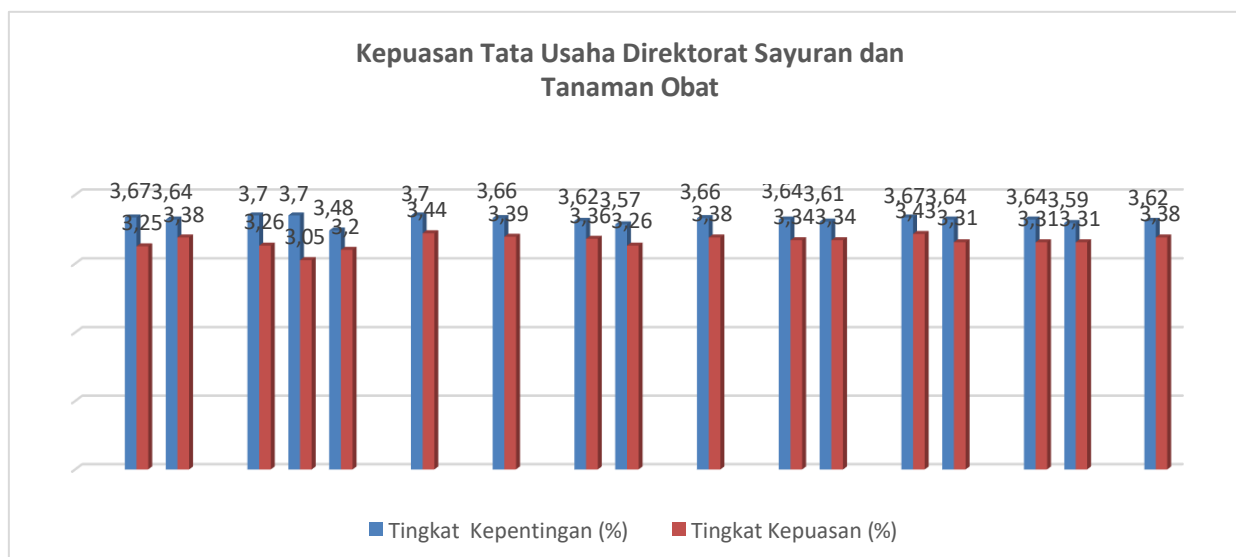
Penggunaan skala likert 1-4 mengacu pada Permentan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman SKM UKPP Kementan. Pengkategorian dilakukan berdasarkan nilai rata-rata jawaban responden dengan cara sebagai berikut:

- Skor minimum per item : 1; Skor maksimum per item : 4;
- Rentang (R) : $4 - 1 = 3$;
- Banyak kategori (K) : 4;
- Panjang interval : $R/K = 3/4 = 0,75$ maka diperoleh interval

Tabel 8. Interpretasi Indeks Kepuasan Rata-Rata

Interval Skor Rata-Rata	Kategori
1,00 - 1,75	Sangat Tidak Puas
1,76 - 2,50	Tidak Puas
2,51 - 3,25	Puas
3,25 – 4,00	Sangat Puas

Hasil penilaian tingkat kepuasan pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat tersaji pada lampiran 3. Berdasarkan hasil olah data kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 61 orang pegawai di Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, maka dari 17 parameter kepuasan layanan, parameter yang paling tinggi tingkat kepuasannya adalah keramahan pegawai tata usaha Kepegawaian dalam memberikan pelayanan Kemudahan mendapatkan/mengajukan layanan administrasi kepegawaian Subbagian Tata usaha (kenaikan pangkat, KGB, Cuti, Karis/Karsu, Pencantuman Gelar dll) dengan nilai 3,44, sedangkan parameter yang tingkat kepuasannya paling rendah adalah kelengkapan toilet dengan nilai 3,05. Perbandingan antara tingkat kepuasan terhadap tingkat kepentingan atau harapan atas layanan Tata Usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dapat dilihat pada gambar 13.



Gambar 13. Grafik Tingkat Kepuasan Kinerja Tata Usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

Hasil analisis kuesioner menunjukkan bahwa tingkat kepuasan rata-rata atas seluruh parameter layanan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat adalah sebesar 3,32 (skala 1-4). Target nilai kepuasan adalah sebesar 3,25, sehingga diperoleh tingkat kesesuaian antara kepuasan dengan harapan sebesar 102, 2 % dan termasuk dalam kategori “Sangat Puas”.

Dalam hasil survei di tabel 8 ada hasil yang rendah dibandingkan dengan tingkat kepentingan diantaranya pada survei

a. Tangibles (berwujud) dengan 5 (lima) pertanyaan

- Kelengkapan Toilet. (Kecukupan air, penerangan, wastafel, kaca, hand soap, pewangi ruangan, penghisap udara, keset, tempat sampah, tissue, kloset) dengan nilai skor : 3,05 %, Yang merespon :
 - Sangat Tidak Puas : 1 responden
 - Tidak Puas : 12 responden
 - Puas : 31 responden
 - Sangat Puas : 17 responden
- Dekorasi tanaman hidup diluar dan didalam ruang kerja dengan nilai skor : 3,20%. Yang merespon :
 - Sangat Tidak Puas : - responden
 - Tidak Puas : 5 responden
 - Puas : 39 responden
 - Sangat Puas : 17 responden

Dari 5 (lima) pertanyaan tersebut dari responden dalam questioner menjawab tidak puas dikarenakan memang masih perlu memperbaiki pelayanan dalam arti perlu dilengkapi kelengkapan toilet serta perlu adanya dekorasi tanaman di luar ruangan yang tertata dengan baik di lingkup Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

b. Reliability (Keandalan) dengan 5 (lima) pertanyaan

Kemudahan mendapatkan/mengajukan layanan layanan persuratan, rumah tangga dan kearsipan di Subbagian Tata Usaha (surat menyurat, ATK, arsip dokumen dll)

Dari pertanyaan yang dijawab oleh responden adalah Puas yang paling banyak, ada juga yang menjawab sangat puas serta 1 orang tidak puas.

c. Kompetensi dan Responsibilitas Pegawai dengan 4 (empat) pertanyaan

Dari pertanyaan yang dijawab oleh responden adalah Puas yang paling banyak, ada juga yang menjawab sangat puas

d. Assurance (Kepastian) dengan 2 (dua) pertanyaan

Dari pertanyaan yang dijawab oleh responden adalah Puas yang paling banyak, ada juga yang menjawab sangat puas serta 2 orang tidak puas.

e. Empaty 1 (satu) pertanyaan

Dari pertanyaan yang dijawab oleh responden adalah Puas yang paling banyak, ada juga yang menjawab sangat puas

Penilaian seseorang terhadap tingkat kepuasan adalah suatu organisasi adalah suatu hal yang wajar kedepannya perlu adanya evaluasi terhadap kinerja tingkat kepuasan tersebut. Perlu adanya dukungan dari pegawai apa yang perlu ada dan apa yang diinginkan di

lingkungan kantor, hal ini butuh adanya perbaikan dan adanya anggaran yang tersedia.

Pelaksanaan ketatausahaan merupakan hubungan antara pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dengan Bagian Tata Usaha yaitu pegawai mendapatkan pelayanan. Pelaksanaan ketatausahaan yaitu berlangsungnya proses pelayanan, memenuhi dan membantu menyediakan segala keperluan atau kebutuhan Pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan bagi para pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

3.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan

Capaian kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025 **selain diukur dari target produksi berdasarkan Perjanjian Kinerja juga diukur dari capaian output kegiatan berdasarkan capaian target yang ada pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT).** Berdasarkan RKT 2025, maka output kawasan adalah Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) 13.500 Kelompok, kawasan aneka cabai 40 ha, kawasan bawang putih 20 ha, serta Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan.

Tabel 9. Capaian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan Tahun 2025

Program/Kegiatan/ Rincian Output		Satuan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Capaian (%)	Kategori
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat						
1	Pekarangan Pangan Bergizi	kelompok	13.500	13.917	103,09	Sangat Berhasil
2	Kawasan Aneka Cabai	Hektar	40	40	100,00	Berhasil
3	Kawasan Bawang Putih	Hektar	20	20	100,00	Berhasil
4	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	40	40	100,00	Berhasil

Pencapaian kinerja berdasarkan target dan realisasi menunjukkan angka 103,09% untuk kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi dan 100% untuk kegiatan kawasan aneka cabai, bawang putih serta kegiatan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan.

3.2.2.1 Capaian Output Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) merupakan kegiatan kerjasama yang pengampunya 2 (dua) Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (TP). Kegiatan ini kolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kemendes PDT) sebagaimana tertuang dalam MoU pada tanggal 11 November 2024.

Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) adalah konsep pertanian yang memanfaatkan lahan

pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang bergizi, seperti sayuran dan buah-buahan. Tujuan dari pekarangan pangan bergizi adalah untuk menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan bermanfaat bagi keluarga dan mendukung ketahanan pangan lokal serta alternatif penambahan pendapatan rumah tangga serta mendukung kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) memiliki sasaran penerima kelompok yang tergabung dalam Poktan/Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ Kelompok PKK/ Kelompok Masyarakat. Komponen bantuan program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) terdiri dari komponen fisik dan non fisik. Komponen fisik berupa tanaman sayuran dan buah dalam *polybag*, benih sachet, sarana produksi lainnya (pupuk) dan sarana pengendali OPT. Selain itu, terdapat dukungan lainnya berupa gerakan pengendalian OPT untuk skala pekarangan. Sedangkan komponen non fisik berupa sosialisasi pengawalan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

Fasilitasi Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) disalurkan dalam bentuk barang, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025

Fasilitasi bantuan yang diberikan dapat berupa:

- a. Tanaman cabai (rawit dan keriting) dalam polybag;
- b. Benih sayuran sachet : Tomat, Buncis, Jagung Manis, Caisim, Kembang kol, Kangkung, Kacang Panjang, Terong Ungu, Kubis, dan Wortel.
- c. Benih Pisang dalam polybag;
- d. Sarana Pengendalian OPT; dan
- e. Sarana Produksi Lainnya (pupuk).

Fasilitasi bantuan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi terbagi menjadi 3 paket pilihan, pembeda antar paket yaitu jenis dan jumlah benih sayuran yang diberikan dalam bentuk sachet. Dalam 1 (satu) kecamatan hanya dapat memilih 1 (satu) paket pilihan bantuan. Paket pilihan yang tersedia sebagai berikut:

Tabel 10. Pilihan Paket 1 Bantuan Kegiatan P2B

No	Komponen	Volume	
1	Tanaman Sayuran	450	Polybag
	- Cabai Rawit	270	Polybag
	- Cabai Keriting	180	Polybag
2	Bibit Pisang	60	Polybag
3	Benih	1	Paket
	- Tomat @ 5 gram		
	- Buncis @ 500 gram		
	- Jagung manis @ 250 gram		
	- Caisim @ 100 gram		
	- Kembang Kol @ 10 gram		
4	Sarana Pengendalian OPT	1	Paket
5	Sarana Produksi Lainnya (pupuk)	1	Paket

Tabel 11. Pilihan Paket 2 Bantuan Kegiatan P2B

No	Komponen	Volume	
1	Tanaman Sayuran	450	Polybag
	- Cabai Rawit	270	Polybag
	- Cabai Keriting	180	Polybag
2	Bibit Pisang	60	Polybag
3	Benih	1	Paket
	- Tomat @ 5 gram		
	- Buncis @ 500 gram		
	- Jagung manis @ 250 gram		
	- Caisim @ 100 gram		
	- Kangkung @ 1.000 gram		
	- Kacang Panjang @ 500 gram		
4	Sarana Pengendalian OPT	1	Paket
5	Sarana Produksi Lainnya (pupuk)	1	Paket

Tabel 12. Pilihan Paket 3 Bantuan Kegiatan P2B

No	Komponen	Volume	
1	Tanaman Sayuran	450	Polybag
	- Cabai Rawit	270	Polybag
	- Cabai Keriting	180	Polybag
2	Bibit Pisang	60	Polybag
3	Benih	1	Paket
	- Tomat @ 5 gram		
	- Buncis 500 gram		
	- Jagung manis @ 250 gram		
	- Caisim @ 100 gram		
	- kubis @ 15 gram		
	- Terong Ungu @ 10 gram		
	- Wortel @ 25 gram		
4	Sarana Pengendalian OPT	1	Paket
5	Sarana Produksi Lainnya (pupuk)	1	Paket

Target Fasilitasi Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) pada tahun 2025 sebanyak 13.500 kelompok dengan total anggaran Rp 176.826.902.000. Realisasi capaian output 13.917 kelompok (103,09%) dengan total realisasi keuangan Rp. 162.902.821.433 (92,13%). Capaian output kegiatan Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) disajikan pada Tabel 13. Beberapa dokumentasi kegiatan Capaian Output Fasilitasi Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) TA 2025 disajikan pada Gambar 14-16.

Tabel 13. Capaian Output Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

No	Provinsi	Target (Kelompok)	Realisasi (Kelompok)	% Realisasi	Kategori
TOTAL		13.500	13.917	103,09	Sangat Berhasil
1	Aceh	555	482	86,85	Berhasil
2	Sumatera Utara	405	500	123,46	Sangat Berhasil
3	Sumatera Barat	585	726	124,10	Sangat Berhasil
4	Riau	195	216	110,77	Sangat Berhasil
5	Jambi	150	150	100,00	Berhasil
6	Sumatera Selatan	330	328	99,39	Berhasil
7	Bengkulu	135	135	100,00	Berhasil
8	Lampung	760	767	100,92	Sangat Berhasil
9	Kepulauan Bangka Belitung	90	80	88,89	Berhasil
10	Kepulauan Riau	195	190	97,44	Berhasil
11	Jawa Barat	1495	1745	116,72	Sangat Berhasil
12	Jawa Tengah	1233	1320	107,06	Sangat Berhasil
13	Di Yogyakarta	180	224	124,44	Sangat Berhasil
14	Jawa Timur	1182	1088	92,05	Berhasil
15	Banten	202	300	148,51	Sangat Berhasil
16	Bali	270	258	95,56	Berhasil
17	Nusa Tenggara Barat	240	240	100,00	Berhasil
18	Nusa Tenggara Timur	570	570	100,00	Berhasil
19	Kalimantan Barat	471	442	93,84	Berhasil
20	Kalimantan Tengah	315	291	92,38	Berhasil
21	Kalimantan Selatan	165	165	100,00	Berhasil

No	Provinsi	Target (Kelompok)	Realisasi (Kelompok)	% Realisasi	Kategori
22	Kalimantan Timur	105	107	101,90	Sangat Berhasil
23	Kalimantan Utara	180	139	77,22	Cukup Berhasil
24	Sulawesi Utara	195	158	81,03	Berhasil
25	Sulawesi Tengah	285	285	100,00	Berhasil
26	Sulawesi Selatan	652	748	114,72	Sangat Berhasil
27	Sulawesi Tenggara	400	409	102,25	Sangat Berhasil
28	Gorontalo	75	79	105,33	Sangat Berhasil
29	Sulawesi Barat	345	360	104,35	Sangat Berhasil
30	Maluku	300	285	95,00	Berhasil
31	Maluku Utara	255	245	96,08	Berhasil
32	Papua	135	93	68,89	Cukup Berhasil
33	Papua Barat	135	123	91,11	Berhasil
34	Papua Selatan	300	300	100,00	Berhasil
35	Papua Tengah	120	74	61,67	Cukup Berhasil
36	Papua Pegunungan	120	120	100,00	Berhasil
37	Papua Barat Daya	175	175	100,00	Berhasil



KT Bina Bersama, Kab. Muaro Jambi
Propinsi Jambi



KT Gabe Naniula, Kab. Dairi
Propinsi Sumatera Utara



KT Tunas Muda Kab. Wonosobo
Propinsi Jawa Tengah



KWT Air Nipis Indah, Kab. Bengkulu Selatan
Propinsi Bengkulu



KT Mandiri, Kab. Garut
Propinsi Jawa Barat



KT Halabok, Kab Yahukimo
Propinsi Papua Pegunungan

Gambar 14. Kegiatan Pekarangan Hortikultura (Serah Terima Bantuan)



KT Peneroka, Kab. Muna Barat
Propinsi Sulawesi Tenggara



KT Tani Sejahtera, Kab. Kepulauan Sula
Propinsi Maluku Utara



KWT Rahayu, Kab. Serdang Bedagai
Propinsi Sumatera Utara



KT Sipakatutu, Kab. Jeneponto
Propinsi Sulawesi Selatan



KT Wela Rana, Kab. Manggarai
Propinsi Nusa Tenggara Timur



KT Wela Rana, Kab. Manggarai
Propinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar 15. Kegiatan Pekarangan Hortikultura (Pertanaman)



KT Waiponi, Kab. Waropen
Propinsi Papua



KWT Wak Ketok Saiyo, Kota Padang
Propinsi Sumatera Barat



KWT Sejahtera, Kab. Muna Barat
Propinsi Sulawesi Tenggara



KWT Galang Lestari, Kab. Empat Lawang
Propinsi Sumatera Selatan



KT Garden Lastarda, Kab. Kolaka Utara
Propinsi Sulawesi Tenggara



KWT Dewi Danu, Kab. Bangli
Propinsi Bali

Gambar 16. Kegiatan Pekarangan Hortikultura (Panen)

3.1.1.1 Capaian Output Kawasan Aneka Cabai

Kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai bertujuan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas cabai merata sepanjang tahun, agar dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah, serta kesejahteraan petani melalui penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Standard Operasional Prosedure* (SOP). Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan aneka cabai dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi.

Kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai tahun 2025 dilaksanakan oleh Satker Pusat (Direktorat Jenderal Hortikultura) dengan luas 40 Ha yang tersebar di 5 provinsi yaitu di 7 kabupaten. Pengadaan melalui satker Pusat dengan komponen bantuan berupa mulsa, SP36, KNO3 dan asam humat. Realisasi kegiatan kawasan aneka cabai mencapai 40 ha atau 100%. Rincian realisasi fisik pengembangan kawasan aneka cabai tahun 2025 disajikan pada Tabel 7. Realisasi keuangan kawasan aneka cabai adalah Rp.385.646.779 (96,92 %) dari nilai pagu anggaran Rp.397.871.000. Dokumentasi kegiatan disajikan ada Gambar 15.

Tabel 14. Capaian Output Kawasan Cabai

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Realisasi %	Kategori
TOTAL				40	40	100	Berhasil
1	Provinsi Jawa Barat						
	1	Bandung	Cabai Rawit	5	5	100	Berhasil
	2	Garut	Cabai Rawit	5	5	100	Berhasil
2	Provinsi Jawa Tengah						
	1	Magelang	Cabai Rawit	10	10	100	Berhasil
3	Provinsi D.I.Yogyakarta						
	1	Sleman	Cabai Rawit	5	5	100	Berhasil
	2	Kulon Progo	Cabai Rawit	5	5	100	Berhasil
4	Provinsi Nusa Tenggara Barat						
	1	Lombok Timur	Cabai Rawit	5	5	100	Berhasil
5	Provinsi Sulawesi Selatan						
	1	Enrekang	Cabai Rawit	5	5	100	Berhasil

Sumber : Direktorat Sayuran dan Tanaman Tahun 2025

Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan aneka cabai masih dihadapkan pada kendala di lapangan seperti cuaca ekstrim dan serangan OPT. Selain itu masalah internal dari petani sendiri, seperti beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional sehingga menyebabkan produktivitas cabai tidak optimal.



KT Ngudi Raharjo 2 Kab. Magelang
Propinsi Jawa Tengah



KT Orang Bedil Kab. Lombok Timur
Propinsi Nusa Tenggara Barat



KT Makmur Kab. Sleman
Propinsi D.I. Yogyakarta



KT Gisik Panaji Kab. Kulon Progo
Propinsi D.I. Yogyakarta



KT Sauyunan Kab. Bandung
Propinsi Jawa Barat



KT Sugih Mukti Kab. Garut
Propinsi Jawa Barat

Gambar 17. Kegiatan Kawasan Aneka Cabai

3.1.1.2 Capaian Output Kawasan Bawang Putih

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan bawang putih adalah meningkatkan produksi, produktivitas dan ketersediaan benih bawang putih di wilayah yang memiliki potensi pengembangan bawang putih. Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan bawang putih dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan ketersediaan benih bawang putih pada sentra produksi.

Pelaksanaan pengembangan kawasan bawang putih tahun 2025 yaitu di pusat melalui Satker Direktorat Jenderal Hortikultura seluas 20 ha (1 Provinsi) yaitu kabupaten Humbang Hasundutan (Sumatera Utara). Rincian lokasi tersaji pada Tabel 9. Fasilitasi bantuan pengembangan kawasan bawang putih baik berupa Benih, NPK dan mulsa. Realisasi keuangan pengembangan kawasan bawang putih tahun 2025 mencapai Rp.3.865.905.750 (99,67 %) dari pagu anggaran Rp 3.878.900.000,- Realisasi kegiatan kawasan bawang putih sesuai target yaitu 20 ha (100%).

Tabel 15. Capaian Output Kawasan Bawang Putih

No	Provinsi Kabupaten/Kota	Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	% Realisasi	Kategori
TOTAL			20	20	100	Berhasil
1	Provinsi Sumatera Utara		20	20	100	Berhasil
	Humbang Hasundutan	Bawang Putih	20	20	100	Berhasil

Sumber : Direktorat Sayuran dan Tanaman Tahun 2025

Secara umum pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan bawang putih sudah berjalan baik, namun di lapangan masih perlu mendapat bimbingan teknis tentang penerapan budidaya sampai dengan panen. Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Putih disajikan pada Gambar 17.

Fasilitasi Kawasan Bawang Putih di Desa Ria Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari bantuan sarana produksi dan bantuan biaya tenaga kerja. Pengadaan sarana produksi berupa benih, pupuk dan penanganan Hama dan Penyakit yang dilaksanakan oleh Pusat. Bantuan biaya tenaga kerja dilaksanakan dengan mekanisme transfer uang ke rekening kelompok.

Pengiriman komponen bantuan saprodi bawang putih TA 2025 diberikan secara bertahap, dimulai dari pupuk organik, pupuk an organik, dolomit, benih umbi, pestisida, dan mulsa dengan total anggaran Rp. 2.910.320.000 pada bulan Oktober – November 2025.

Kegiatan Pengadaan Biaya Tenaga Kerja dilakukan dengan cara 2 tahap yaitu tahap 1 anggaran diberikan untuk kegiatan Pra Tanam dan Penanaman dengan persentase kegiatan 70 % dan tahap 2 diberikan untuk kegiatan Pemeliharaan dan Pemeliharaan lanjutan dengan persentase 30 % dari Jumlah total anggaran Rp. 768.000.000,-



KT Ganda Marsada Kab. Humbang Hasundutan
Propinsi Sumatera Utara



KT Ria Kerja Kab. Humbang Hasundutan
Propinsi Sumatera Utara



KT Karejo Kab. Humbang Hasundutan
Propinsi Sumatera Utara



KT Sehati FE, Kab. Humbang Hasundutan
Propinsi Sumatera Utara



KT Ria Bersinar, Kab. Humbang Hasundutan
Propinsi Sumatera Utara



Acara Tanam Bersama, Kab. Humbang Hasundutan
Propinsi Sumatera Utara

Gambar 18. Pengembangan Kawasan Bawang Putih (Aktivitas Budidaya)

Biaya Tenaga pra tanam meliputi: 1) pengerjaan bajak 1, bajak 2, rotari dengan menggunakan alat bajak yang di sewa dari Dinas Pertanian/ Bapeda Kabupaten Humbang Hasundutan dan pengerjaan dilaksanakan secara bergilir sesuai dengan kesiapan lahan anggota kelompok,

2) Pengaplikasian pupuk kandang, dolomit, dan pupuk SP, 3) Kegiatan pembedengan dan semprot herbisida dilakukan agar tanaman liar/gulma tidak mudah tumbuh, 4) Kegiatan Pemasangan mulsa 5) penyortiran benih, pengelompokkan benih dan pencelupan benih. Biaya Tenaga Kerja Penanaman meliputi: biaya melakukan pertanaman bawang putih. Biaya Tenaga Kerja Pemeliharaan meliputi penyiraman, penyiangan, pemupukan susulan, dan penyemprotan pestisida

3.2.2.4. Capaian Output Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan

Fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat dilaksanakan oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, serta pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.446.660.000 dan telah terealisasi Rp. 4.351.919.957 atau 97,87%.

A. Bimbingan Teknis Pekarangan Pangan Bergizi (SB)

Bimbingan teknis Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman budidaya skala rumah tangga, perlu dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis, baik dalam bentuk pemberian materi/praktek. Harapannya dengan bimtek tersebut dapat meningkatkan kapabilitas penerima manfaat sehingga pelaksanaan kegiatan P2B dapat berhasil, serta menguatkan kelembagaan kelompok dan menciptakan usaha pertanian berbasis bisnis.

Bimbingan teknis Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dilaksanakan sebanyak 445 kali diantara bulan Juni-Desember 2025 tersebar di 37 Provinsi dan 376 Kabupaten penerima kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Peserta kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) adalah penerima manfaat, PPL, POPT, Tim Teknis dan Petugas Dinas Kabupaten. Rincian pelaksanaan bimtek disajikan pada Tabel 14.

Tabel 16. Bimtek Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

No	Provinsi/Pulau	Jumlah Bimtek (Kali)	No	Provinsi/Pulau	Jumlah Bimtek (Kali)
Sumatera		136	Kalimantan		47
1	Aceh	17	19	Kalimantan Barat	7
2	Sumatera Utara	20	20	Kalimantan Tengah	9
3	Sumatera Barat	19	21	Kalimantan Selatan	19
4	Riau	13	22	Kalimantan Timur	7
5	Jambi	9	23	Kalimantan Utara	5
6	Sumatera Selatan	12	Sulawesi		76
7	Bengkulu	9	24	Sulawesi Utara	7
8	Lampung	21	25	Sulawesi Tengah	11
9	Kepulauan Bangka Belitung	10	26	Sulawesi Selatan	24
10	Kepulauan Riau	6	27	Sulawesi Tenggara	20
Jawa		111	28	Gorontalo	8
11	Jawa Barat	31	29	Sulawesi Barat	6
12	Jawa Tengah	42	Maluku dan Papua		31
13	DI Yogyakarta	8	30	Maluku	6
14	Jawa Timur	27	31	Maluku Utara	6
15	Banten	3	32	Papua Barat	4
Bali dan Nusa Tenggara		44	33	Papua	4
16	Bali	14	34	Papua Selatan	4
17	Nusa Tenggara Barat	15	35	Papua Tengah	3
18	Nusa Tenggara Timur	15	36	Papua Pegunungan	3
			37	Papua Barat Daya	1



Kab. Toli-Toli
Propinsi Sulawesi Tengah



Kab. Kepahiang
Propinsi Bengkulu



Kab. Purworejo
Propinsi Jawa Tengah



Kab. Maros
Propinsi Sulawesi Selatan



Kab. Taliabu
Propinsi Maluku Utara



Kota Yogyakarta
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 19. Bimbingan Teknis Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

B. Bimbingan Teknis Bawang Putih Unggul Kemitraan dengan Pelaku Usaha

1. Bimbingan teknis Bawang Putih Unggul Kemitraan dengan Pelaku Usaha dilaksanakan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman budidaya skala rumah tangga, perlu dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis, baik dalam bentuk pemberian materi/praktek. Harapannya dengan bimtek tersebut dapat meningkatkan kapabilitas penerima manfaat sehingga pelaksanaan kegiatan Kawasan dapat berhasil, serta menguatkan kelembagaan kelompok dan menciptakan usaha pertanian berbasis bisnis.
2. Bimbingan teknis Bawang Putih Unggul Kemitraan dengan Pelaku Usaha dilaksanakan sebanyak 6 kali diantara bulan Oktober 2025 tersebar di 2 Provinsi dan 6 Kabupaten (Kabupaten Humbang Hasundutan, Temanggung, Wonosobo, Kendal, Magelang, dan Pekalongan) penerima kegiatan kawasan bawang putih. Peserta kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan kawasan bawang putih adalah penerima manfaat, PPL, POPT, Tim Teknis dan Petugas Dinas Kabupaten.
3. Narasumber yang diundang dalam acara Prof. Dr. Ir. Hadiwiyono, M.Si. dari Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. Ir. Sobir, M.Si (IPB), Prof. Dr. Ir. Widodo, M.S (UGM), Champion bawang Putih dan Pelaku Usaha Bawang Putih membahas tentang cara budidaya untuk meningkatkan produktivitas diatas 6 ton/ha, penanganan Hama dan Penyakit, dan Pemasaran bawang putih.

Tabel 17. Bimtek Bawang Putih Unggul Kemitraan dengan Pelaku Usaha

No	Propinsi /kabupaten/kota	Tanggal PelaksanaanBimtek	Jumlah Peserta
1	Sumatera Utara		
	Humbang Hasundutan	16 Oktober 2025	40 orang
2	Jawa Tengah		
	- Temanggung	24 Oktober 2025	50 orang
	- Wonosobo	23 Oktober 2025	55 orang
	- Kendal	28 Oktober 2025	45 orang
	- Magelang	29 Oktober 2025	50 orang
	- Pekalongan	29 Oktober 2025	40 orang



Kab. Magelang
Propinsi Jawa Tengah



Kab. Kendal
Propinsi Jawa Tengah



Kab. Pekalongan
Propinsi Jawa Tengah



Kab. Wonosobo
Propinsi Jawa Tengah



Kab. Pekalongan
Propinsi Jawa Tengah

Gambar 20. Bimbingan Teknis Kegiatan Bawang Putih Unggul Kemitraan dengan Pelaku Usaha

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan serta permasalahan yang terjadi di sentra produksi agar target pengembangan sayuran dan tanaman obat dapat terealisasi. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pendampingan, pembinaan, koordinasi, konsultasi dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat serta dalam penerapan GAP/SOP sayuran dan tanaman obat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi sayuran dan tanaman obat dari segi kuantitas maupun kualitas dan meningkatkan ekspor sayuran dan tanaman obat. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara langsung ke lapangan ke daerah sentra pengembangan sayuran dan tanaman obat dan dilakukan secara berkala.

3.2.2.5 Capaian Kinerja Pendampingan Swasembada Kabupaten Padang Lawas Dan Padang Lawas Utara

Tugas Tambahan berdasarkan SK Kepmentan No 109/Kpts/PW.020/M/03/2025 Tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada kegiatan Swasembada Pangan. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat mendapat tanggung jawab mengawal LTT, Oplah dan Cetak Sawah Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara dalam lampiran 6.

Dalam rangka mendorong percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai upaya dalam mencapai target swasembada pangan nasional pada tahun 2025, dilakukan pemantauan harian terhadap Capaian dan Evaluasi LTT, Optimasi Lahan (Oplah), Cetak Sawah Rakyat (CSR), dan Padi Gogo

A. Target LTT Kabupaten Paluta dan Palas

Berdasarkan Tabel 18. Kabupaten Palas memiliki target Oplah 500 ha, 2 brigade pangan, LTT Reguler 28.259 ha, dan padi gogo 475 ha. Sedangkan untuk Kabupaten Paluta memiliki target Oplah 2.500 ha, 12 brigade pangan, LTT Reguler 78.118 ha, dan padi gogo 480 ha.

Tabel 18. Target Oplah, CSR, BP, LTT Reguler, dan Padi Gogo

Kabupaten	Optimalisasi Lahan (Ha) 2024	Target Brigade Pangan 2024	Optimalisasi Lahan (Ha)/Cetak Sawah Rakyat (2025)	Target Brigade Pangan 2025	Target LTT Reguler	Target Padi Gogo
Padang Lawas			500	2	28.259	475
Padang Lawas Utara			2.500	12	78.118	480

B. LTT Reguler dan Padi Gogo Kabupaten Paluta

Berdasarkan tabel 19, penambahan LTT terbanyak pada Bulan Desember dari Kecamatan

Padang Bolak seluas 566,5 ha, Kecamatan Portibi seluas 566,5 ha, dan Kecamatan Padang Bolak Julu seluas 370 ha. Realisasi padi reguler untuk bulan Desember seluas 2.464,35 ha, Oplah 183 ha, dan padi gogo seluas 119,1 ha.

Tabel 19. Realisasi Total LTT reguler dan padi gogo Kabupaten Paluta per 31 Desember 2025

No	Kecamatan	Target Desember	Realisasi LTT			Total Tanam Reguler Bulan Desember Padi	Tambah/ Kurang dari Target	%
			Padi Reguler	OPLAH	PADI GOGO			
1	BATANG ONANG	251	258	30	0	288	37	115%
2	PADANG BOLAK JULU	243	225	80	65	370	127	152%
3	PORTIBI	312	510	56	0,5	566,5	255	182%
4	PADANG BOLAK	510	549,5	17	0	566,5	57	111%
5	PADANG BOLAK TENGGARA	116	355,5	0	0	355,5	240	308%
6	SIMANGAMBAT	0	8,5	0	0,5	9	9	900%
7	UJUNG BATU	8	0,1	0	39,1	39,2	31	490%
8	HALONGONAN	143	220,5	0	7,5	228	85	159%
9	HALONGONAN TIMUR	13	0	0	2,5	2,5	-11	19%
10	DOLOK	20	201,25	0	0	201,25	181	1006%
11	DOLOK SIGOMPULON	21	8	0	0	8	-13	38%
12	HULU SIHAPAS	113	128	0	4	132	19	117%
Total		1749,5	2464,35	183	119,1	2766,45	1016,95	158 %

I. LTT Reguler dan Padi Gogo Kabupaten Palas

Tabel 20. Realisasi Total LTT reguler dan padi gogo Kabupaten Palas per 31 Desember 2025

No	Kecamatan	Target Desember	Realisasi LTT			Total	%
			Padi Reguler (ha)	OPLAH (ha)	Padi Gogo (ha)		
1	SOSOPAN	-	25,0	-	-	25,0	2500%
2	ULU BARUMUN	142,0	125,5	-	-	125,5	88%
3	BARUMUN	21,0	53,1	-	-	53,1	253%
4	BARUMUN SELATAN	-	-	-	-	-	0%
5	BARUMUN BARU	100,0	270,0	-	-	270,0	270%
6	LUBUK BARUMUN	65,0	39,0	-	-	39,0	60%
7	SOSA	-	-	-	-	-	0%
8	ULU SOSA	-	-	-	-	-	0%
9	SOSA JULU	-	77,5	-	-	77,5	7750%
10	BATANG LUBU SUTAM	25,0	-	-	-	-	0%
11	HUTA RAJA TINGGI	-	-	-	-	-	0%
12	SOSA TIMUR	-	-	-	-	-	0%
13	HURISTAK	150,0	271,7	-	-	271,7	181%
14	BARUMUN TENGAH	-	15,3	-	-	15,3	153%
15	AEK NABARA BARUMUN	70,0	8,0	-	-	8,0	11%
16	SIHAPAS BARUMUN	150,0	14,0	-	-	14,0	9%
17	BARUMUN BARAT	80,0	-	-	-	-	0%
Jumlah		803	899,03	-	-	899,03	112%

Berdasarkan tabel 20. Penambahan LTT terbanyak pada Bulan Desember dari Kecamatan Barumun Baru dengan total realisasi 270 ha dan Kecamatan Huristak seluas 271,7 ha.

II. Progres Brigade Pangan Kabupaten Paluta dan Palas

Tabel 21. Realisasi Brigade Pangan Kab. Paluta dan Palas

Kabupaten/Kota	Target BP Kementan				Realisasi BP				SK Penetapan BP	PKS Lahan	Form Kesanggupan Peningkatan IP
	CSR	Rawa Oplah	Oplah Non Rawa	Total	CSR	Oplah Rawa	Oplah Non rawa	Total			
Padang Lawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Padang Lawas Utara	0	0	12	12	0	0	11	11	11	0	0

Berdasarkan tabel 21. Kabupaten Paluta memiliki target 12 BP dan sudah terbentuk 11 BP ditetapkan dalam SK BP sebanyak 11 BP. Untuk 11 BP di Kabupaten Paluta yang sudah terbentuk dan ditetapkan dalam SK, belum ditindak lanjuti hingga tahap PKS lahan dan kesanggupan peningkatan IP.

Permasalahan :

1. Beberapa titik Lokasi di Kecamatan Sihapas Barumon, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kecamatan Barumon Barat, Kecamatan Batang Lubu Sutam, dan beberapa kecamatan lain menunjukkan realisasi nol atau sangat rendah, hal ini dikarenakan beberapa wilayah kurangnya debit air/ hujan tidak merata.
2. Beberapa kecamatan menunjukkan realisasi rendah, seperti Kecamatan Simangambat, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Halongonan Timur, dan Kecamatan Dolok Sigompulon yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama mulai adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan sawit di Kecamatan Halongonan.

3.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Parameter keberhasilan kinerja juga diukur dari efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini besarnya anggaran yang digunakan untuk mencapai target output kegiatan dan nilai efisiensi.

Berdasarkan Tabel 22 diketahui bahwa realisasi anggaran berdasarkan output kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025 anggaran 92.43 %. Realisasi keuangan tahun ini lebih rendah dibanding realisasi keuangan tahun 2024 yang sebesar 99,59 %. Tahun 2025 di prioritaskan terhadap pengembangan kawasan cabai, bawang putih dan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) untuk mendukung kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Tabel 22. Realisasi Anggaran Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025

No.	Nama Rincian Output (RO)	Keuangan			
		Satuan	Pagu	Realisasi	(%)
1.	1771.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	4.446.660.000	4.351.919.957	97,87
2.	1771.QDD.011 Pekarangan Hortikultura	Kelompok Masyarakat	176.826.902.000	162.896.440.503	92,12
3.	1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai	Ha	397.871.000	384.936.779	96,75
4.	1771.RAI.014 Kawasan Bawang Merah	Ha	3.878.900.000	3.865.905.750	99,67
	Jumlah		185.550.333.000	171.499.202.989	92,43

Sumber : Data OMSPAM per 9 Januari 2025

Berdasarkan Tabel 22 diketahui bahwa realisasi anggaran berdasarkan output kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025 adalah sebesar 92,43 %.

Tabel 23. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Output Kegiatan Tahun 2025 untuk Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

No.	Nama Rincian Output (RO)	Fisik				Keuangan			AARO x CRO	(AARO X CRO) – RARO
		Satuan	Target	Realisasi fisik	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)	(%)		
1	1771.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	40	40	100,00	4.446.660.000	4.351.919.957	97,87	4.446.660.000	94.740.043
2	1771.QDD.011 Pekarangan Hortikultura	Kelompok Masyarakat	13.500	13.917	103,09	176.826.902.000	162.896.440.503	92,12	182.288.888.528	19.392.448.025
3	1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai	Ha	40	40	100,00	397.871.000	384.936.779	96,75	397.871.000	12.934.221
4	1771.RAI.014 Kawasan Bawang Putih	Ha	20	20	100,00	3.878.900.000	3.865.905.750	99,67	3.878.900.000	12.994.250
	Jumlah					185.550.333.000	171.499.202.989		191.012.319.528	19.513.116.539
	Efisiensi					$\frac{\sum((AARO \times CRO) - RARO)}{\sum(AARO)}$				10,52
	Nilai Efisiensi					50% + E/20 X 50				76

Berdasarkan penghitungan terhadap efisiensi penggunaan anggaran seperti yang disajikan pada Tabel 23 diperoleh hasil angka efisiensi sebesar 10,52 % dan nilai efisiensi sebesar 76 %.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Adanya dinamika dalam proses penganggaran dalam pelaksanaan program peningkatan produksi dan nilai tambah sayuran dan tanaman obat tahun 2025 menyebabkan terjadinya perubahan alokasi anggaran dan volume output. Perubahan anggaran terjadi karena adanya *refocusing* kegiatan dan anggaran.

Permasalahan teknis lainnya yang menjadi kendala adalah keterbatasan jumlah benih bermutu, ketepatan waktu ketersediaan benih bermutu dan faktor musim tanam, serta administrasi terkait proses pengadaan, SDM, dan koordinasi antar pelaksana kegiatan.

Realisasi anggaran di akhir tahun 2025 menunjukkan serapan yang baik, namun pada proses realisasi keuangan dari Satker Pusat berjalan sangat lambat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan baik di pusat maupun daerah antara lain 1) Beberapa Dinas Pertanian baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani bidang kesatkeran sehingga penyelesaian proses SPJ menjadi lambat;

2) Proses pengusulan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) yang lambat; 3) Belum selarasnya koordinasi antara satker provinsi dan satker kabupaten untuk dana yang ada di provinsi (TP Provinsi), 4) keterlambatan dalam laporan BAST di aplikasi BAST-BANPEM

3.3 Permasalahan dalam Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025

Berbagai keberhasilan dan manfaat telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan tanaman sayuran dan tanaman obat tahun 2025. Namun dalam pelaksanaannya ditemui berbagai permasalahan dan hambatan, baik dari aspek teknis budidaya maupun aspek manajemen. Beberapa permasalahan dan hambatan yang ditemui adalah sebagai berikut:

3.3.1 Aspek Budidaya

A. Aneka Cabai

1. Terbatasnya pengembangan kawasan aneka cabai dialokasikan di wilayah sentra cabai dan menjadi binaan Champion Cabai agar dapat dilakukan pengaturan pola tanam utamanya saat masa *off season* sehingga cabai dapat tersedia sepanjang tahun.
2. Kondisi iklim seperti kekeringan ekstrem dan bencana banjir, sehingga menyebabkan kegagalan panen/produktivitas rendah di beberapa lokasi sentra cabai.
3. Harga sarana produksi seperti pupuk dan mulsa menyebabkan beban biaya produksi petani semakin tinggi.

4. Belum optimalnya penerapan GAP/SOP pada budidaya cabai, bahkan sebagian besar masih dilakukan secara konvensional/tradisional. Hal ini menyebabkan produktivitas rendah dan produk yang dihasilkan belum sepenuhnya bermutu dan aman dikonsumsi.

B. Bawang Merah

1. Terbatasnya pengembangan bawang merah *off season* khususnya penanaman pada musim penghujan bulan Januari s/d April.
2. Penggunaan pestisida yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan sifat fisik dan kimia tanah, disamping itu tingkat pencemaran lingkungan dan residu pestisida tinggi. Penggunaan sarana pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan belum optimal.
3. Faktor iklim yang ekstrim Adanya banjir dan longsor pada bulan November-Desember 2025 menyebabkan tanaman bawang merah puso.
4. Kenaikan harga sarana produksi terutama benih mencapai harga diatas Rp. 50.000/ kg dan pupuk menyebabkan beban biaya produksi petani semakin tinggi.

C. Bawang Putih

1. Penguasaan teknologi dalam penerapan budidaya masih terbatas terutama di daerah pengembangan baru.
2. Daya saing bawang putih lokal dinilai masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor terutama dalam aspek ukuran (size) dan harga (price).
3. Produksi bawang putih sebagian besar masih berorientasi untuk benih, sehingga harga sangat dipengaruhi kondisi pasar benih.
4. Penggunaan pestisida yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan sifat fisik dan kimia tanah, disamping itu tingkat pencemaran lingkungan dan residu pestisida tinggi. Penggunaan sarana pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan belum optimal.
5. Musim panen di bulan Februari-April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar, menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan.
6. Faktor iklim yang ekstrim (curah hujan tinggi) memicu merebaknya OPT dan berisiko gagal tanam dan/atau panen.

D. Kentang

1. Penerapan GAP dan SOP dalam budidaya sayuran masih belum optimal
2. Cuaca yang ekstrim seperti musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang cukup tinggi berdampak pada keadaan lahan, pertumbuhan tanaman, intensitas serangan OPT dan kualitas hasil panen.
3. Harga komoditas sayuran yang terkadang turun tajam, sehingga petani rugi dan kesulitan modal untuk berbudidaya tanaman sayuran pada musim tanam berikutnya.

E. Sayuran Daun

1. Penerapan GAP dan SOP dalam budidaya sayuran masih belum optimal
2. Cuaca yang ekstrim seperti musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang cukup tinggi berdampak pada keadaan lahan, pertumbuhan tanaman, intensitas serangan OPT dan kualitas hasil panen.
3. Harga yang rendah dan akses pasar yang terbatas sehingga sering terjadi peralihan komoditas
4. Belum ada kegiatan khusus untuk pengembangan Kawasan Sayuran Daun khususnya sawi/petsai sejak tahun 2022 sampai sekarang, sehingga tidak adanya pembinaan di lapangan.

F. Tomat

1. Penerapan GAP dan SOP dalam budidaya sayuran masih belum optimal
2. Cuaca yang ekstrim seperti musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang cukup tinggi berdampak pada keadaan lahan, pertumbuhan tanaman, intensitas serangan OPT dan kualitas hasil panen.
3. Harga komoditas sayuran yang terkadang turun tajam, sehingga petani rugi dan kesulitan modal untuk berbudidaya tanaman sayuran pada musim tanam berikutnya.

G. Wortel

1. Penerapan GAP dan SOP dalam budidaya sayuran masih belum optimal
2. Cuaca yang ekstrim seperti musim kemarau yang panjang dan curah hujan yang cukup tinggi berdampak pada keadaan lahan, pertumbuhan tanaman, intensitas serangan OPT dan kualitas hasil panen.
3. Harga komoditas sayuran yang terkadang turun tajam, sehingga petani rugi dan kesulitan modal untuk berbudidaya tanaman sayuran pada musim tanam berikutnya.

H. Jamur

1. Penerapan GAP dan SOP dalam budidaya sayuran masih belum optimal
2. Dampak perubahan iklim terutama kemarau panjang dan curah hujan yang tinggi berdampak pada pola tanam, provitas, keadaan lahan, pertumbuhan tanaman, intensitas serangan OPT dan kualitas hasil panen
3. Kurangnya benih jamur yang berkualitas berdampak pada produktivitas jamur menjadi kurang optimal.
4. Tingginya harga bahan media dan kelangkaan media hidup jamur seperti serbuk gergaji untuk pertanaman jamur menyebabkan banyak petani yang tidak membudidaya.
5. Kurangnya penguasaan teknologi budidaya jamur sehingga sering terjadi kontaminasi pada media tanam yang menyebabkan rendahnya daya tumbuh bibit jamur.
6. Sarana bangunan kubung petani yang masih banyak belum sesuai dengan SOP standar kubung.
7. kelembagaan petani jamur yang masih harus diperkuat.
8. Belum ada kegiatan khusus untuk pengembangan kawasan jamur sejak tahun 2022 sampai sekarang sehingga tidak adanya pembinaan di lapangan. Hal itu menyebabkan kurangnya motivasi petani untuk membudidayakan jamur.

I. Tanaman Obat

1. Penerapan SOP dalam berbudidaya tanaman obat di petani masih terbatas.
2. Benih bermutu untuk tanaman obat masih terbatas.
3. Dampak perubahan iklim terutama kemarau panjang dan curah hujan yang tinggi yang mempengaruhi perubahan pola tanam, provitas, serangan OPT dan kualitas tanaman obat di lapangan.
4. Teknologi pascapanen dan pengolahan untuk tanaman obat masih terbatas.
5. Luas tanam jahe dan kunyit berkurang karena harga pada kedua komoditas tersebut rendah dan masa panennya lama, sehingga banyak petani yang beralih menanam komoditas lain seperti palawija dan aneka sayuran yang umur panennya lebih singkat.
6. Pemasaran dan kemitraan untuk petani tanaman obat yang masih sangat terbatas.
7. Masih terbatasnya penangkar/produsen benih tanaman obat bermutu.
8. Belum ada kegiatan khusus untuk pengembangan kawasan jahe sejak tahun 2024 sampai sekarang sehingga tidak adanya pembinaan di lapangan.

3.3.2 Aspek Manajemen

1. Keterbatasan jumlah SDM kesatkeran, teknis, lapang dan monev.
2. Koordinasi antara Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten dalam pelaksanaan TP provinsi belum berjalan sinergis.
3. Adanya kegiatan refokusing anggaran untuk mendukung kegiatan penanaman padi untuk swasembada pangan, sehingga beberapa alokasi bantuan yang sudah masuk usulan CPCL-nya dibatalkan.
4. Penyedia sebagai pihak ketiga pada kegiatan pengadaan saprodi hendaknya tertib administrasi sesuai dengan batas akhir kontrak yang disepakati terutama dalam pemenuhan dokumen BAST, Surat Jalan, *Open Camera*, KTP Penerima Manfaat dan penginputan BAST Banpem.
5. Adanya refocusing anggaran terhadap penyediaan benih jahe di Direktorat Perbenihan menyebabkan petani tidak bisa melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan jahe sesuai target luasan yang ditetapkan meskipun sarana produksi lainnya sudah diterima petani.

3.4 Tindak Lanjut/Rencana Aksi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut/rencana aksi terdapat pada lampiran 4.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban penggunaan sumberdaya dan dana yang menjadi tuntutan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja juga merupakan umpan balik dan introspeksi terhadap hal-hal yang telah dan belum dilaksanakan serta perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja institusi. Diharapkan dengan disusunnya laporan ini. dapat menjadi salah satu acuan untuk membenahi diri dan meningkatkan prestasi kerja dan kinerja dengan meningkatkan berbagai koordinasi. sinergisme dan kerjasama antar institusi dan swasta (petani dan pelaku usaha) sehingga dapat dicapai hasil yang lebih optimal.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dapat dikatakan berhasil, karena capaian kinerja dari 5 (lima) Indikator yaitu, 1) Rata-rata luas panen komoditas sayuran prioritas dengan persentase hasil kinerja 97,82 % (berhasil), 2) Rata-rata luas panen komoditas tanaman obat prioritas dengan persentase hasil kinerja 87,73 % (berhasil), 3) Peningkatan luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara, 4) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terhadap layanan ketatusahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dengan persentasi hasil nilai kepuasan 102,15 % (sangat berhasil). Hasil pencapaian peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dilakukan melalui dukungan dana APBN dan juga swadaya pelaku usaha.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat selama satu tahun anggaran 2025 telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mengacu pada pembangunan yang lebih baik. dengan memanfaatkan SDM, dana, dan sarana secara optimal. Hasil dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan memberikan kontribusi positif pada pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan agribisnis tanaman sayuran dan tanaman obat diupayakan memberikan motivasi kepada *stakeholder* untuk melakukan kegiatan secara lebih baik. serta dapat menjadi pembelajaran dan bahan masukan bagi pihak pelaksana kegiatan lainnya. Dengan pendekatan ini maka keseriusan dan profesionalisme dalam pelaksanaan proyek dapat ditingkatkan. sehingga peningkatan kinerja dan akuntabilitas pembangunan agribisnis sayuran dan tanaman obat dapat lebih ditingkatkan. Keberhasilan program-program peningkatan produksi dan mutu produk sayuran dan tanaman obat juga ditentukan oleh kinerja petugas dan pelaku usaha di daerah. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut.

Beberapa langkah yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat yang baik, efektif dan efisien, antara lain: 1) Mendorong Fasilitas penanganan sarana produksi kawasan dalam rangka mengamankan lokasi yang masih defisit dan lokasi penyangga aneka cabai dan bawang merah nasional agar inflasi dan ketersediaan komoditas strategis bisa terjaga; 2) Melakukan identifikasi CPCL pada akhir tahun 2025 untuk CPCL tahun 2025, 3) Mempercepat pengadaan yang tidak melalui proses lelang dan proses penyelesaian SPJ. 4) Meningkatkan kompetensi SDM melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, bimbingan teknologi dan pelatihan manajemen baik di tingkat pusat maupun di daerah bekerjasama dengan instansi terkait; 5) Penyediaan dana yang memadai, baik yang bersumber dari APBN, APBD I, APBD II, maupun masyarakat petani untuk mendukung kegiatan sayuran dan tanaman obat, perlu terus diupayakan; 6) Mendorong digitalisasi pertanian yaitu melalui pengembangan dan optimalisasi Sistem Informasi (SI) Hortikultura dan digitalisasi proses bisnis.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Daftar Pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

No.	Nama		L/P	Gol.	Pendidikan	Keterangan
1	Dr. MUHAMMAD AGUNG SUNUSI, SP.,M.Si.	1	L	IV/c	S3	DIREKTUR
2	INDRA HUSNI, S.TP, MM	1	L	IV/b	S2	PNS / PMHP AHLI MADYA
3	ERNAWATI HR, SP, M.M	1	P	IV/a	S2	PNS / PMHP AHLI MUDA
4	MUTIARA SARI, S.TP, Ph.D	1	P	IV/a	S3	PNS / PMHP AHLI MADYA
5	DR. RIATANIA R.B. LUBIS, SP, MM.	1	P	IV/a	S3	PNS
6	FAJAR ANGGRAENI, SP, M.Ling.	1	P	IV/a	S2	PNS / PMHP AHLI MUDA
7	APRIYANTI ROGANDA YUNIAR, S.P., M.Si.	1	P	IV/a	S2	PNS / PMHP AHLI MUDA
8	BUDI HARTONO, SP, M.Si	1	L	IV/a	S2	PNS / PMHP AHLI MUDA
9	DUMA JULIETHA BANJARNAHOR, SP, M.Si	1	P	IV/a	S2	PNS / PMHP AHLI PERTAMA
10	JUNIKA MEGAWATY PASARIBU, SP, M.Si	1	P	IV/a	S2	PNS / PMHP AHLI MADYA
11	ASIMA NAPITUPULU, SP, M.P	1	P	IV/a	S2	PNS
12	HENY NOVRIYANTY, S.P, M.AP	1	P	IV/a	S2	PNS/Analisis Kebijakan Pertama
13	POPY SURYANI SITOMPUL, S.KOM	1	P	III/d	S1	PNS
14	RADEN YANA MULYANA INDRIYANA, SE	1	L	III/d	S1	PNS / KASUBBAG TU
15	JAMIN WALUDIN, S.SOS	1	L	III/d	S1	PNS
16	SUHARNI, S.T.P, M.Sc	1	P	III/d	S2	PNS / PMHP AHLI MUDA
17	WENI FIKA, S.T.P., M.P.	1	P	III/d	S2	PNS / PMHP AHLI MUDA
18	LILI, S.TP	1	L	III/d	S1	PNS / PMHP AHLI MUDA
19	NUR LAILI RAHMAWATI, SP, M.E	1	P	III/d	S2	PNS / PMHP AHLI MUDA
20	SUBARDI, S.T.P., M.Si	1	L	III/d	S2	PNS / PMHP AHLI MUDA
21	ARDI JULIANTO, S.TP	1	L	III/d	S1	PNS / PMHP AHLI MUDA
22	EKA PUJI ASTUTI, S.GZ, MP	1	P	III/d	S2	PNS/Analisis Kebijakan Pertama
23	AIDIL AZHAR, SP	1	L	III/c	S1	PNS / PMHP AHLI MUDA

24	SITI HURRIYAH RAHIMY, S.TP	1	P	III/c	S1	PNS / PMHP AHLI MUDA
25	HARIYANTO, SP	1	L	III/c	S1	PNS
26	RUBIATUN, SP.	1	P	III/c	S1	PNS
27	DWI YANTO RAHARJO	1	L	III/b	SLTA	PNS
28	ENI ROHANI	1	P	III/b	SLTA	PNS
29	SRI MULATMI	1	P	III/b	SLTA	PNS
30	DARSINI	1	P	III/b	SLTA	PNS
31	FAJAR ISTIQOMAH, SE , M.Sc.	1	P	III/b	S2	PNS
32	NURAZMI, S.P.	1	P	III/b	S1	PNS / PMHP AHLI PERTAMA
33	DIANA HERLINA, S.E.	1	P	III/b	S1	PNS
34	CITRA LESTARI, S.P.	1	P	III/b	S1	PNS / PMHP AHLI PERTAMA
35	V.C. AGUNG NUGROHO	1	L	III/b	SLTA	PNS
36	MOHAMAD JUHARI	1	L	III/b	SLTA	PNS
37	RIKA MANDASARI, S.T.P.	1	P	III/b	S1	PNS
38	ZUL RAMDHAN, S.Sos	1	L	III/b	S1	PNS
39	LIDYA KHOIRUNNISA, SP.	1	P	III/b	S1	PNS
40	ELLA WINDA RAHMATIKA, S.Si.	1	P	III/a	S1	PNS
41	ROJALI , S.I.Kom.	1	L	III/a	SLTA	PNS
42	RIJALUDIN AKBAR, SP.	1	L	III/a	S1	PNS / PMHP AHLI PERTAMA
43	CAHYO MULYO PUTRANTO, SP.	1	L	III/a	S1	PNS / PMHP AHLI PERTAMA
44	KATARINA IKA NOVIANITA, S.P.	1	P	III/a	S1	PNS / PMHP AHLI PERTAMA
45	DEA ROSALIA, S.P.	1	P	III/a	S1	PNS / PMHP AHLI PERTAMA
46	IVAN PURNAMA	1	L	II/d	SLTA	PNS
47	ROYANIH	1	L	II/c	SLTA	PNS
48	NURDIN HIDAYAT	1	L	II/a	SD	PNS

49	FAPIN SINAGA, A.Md.	1	L	II/c	D3	CPNS (01 MEI 2025)
----	---------------------	---	---	------	----	--------------------

50	AHMAD WIJAYA KURNESA, A.Md.	1	L	II/c	D3	CPNS (01 MEI 2025)
51	MUHAMAD ALPIAN, S.P.	1	L	IX	S1	P3K (01 November 2023) / PMHP AHLI PERTAMA
52	DIAN MAYA SARI, S.T.P.	1	P	IX	S1	P3K (01 Februari 2024) / PMHP AHLI PERTAMA
53	MUCHTAR JOSUA SIBARANI, S.Agr	1	L	IX	S1	P3K (01 Februari 2024) / PMHP AHLI PERTAMA
54	AFIF MUZAKI AHSAN, AP	1	L	IX	S1	P3K (01 Maret 2025)
55	ARIF WAHYU HIDAYAT	1	L	V	SLTA	P3K (01 Maret 2025)
56	MEGA DWI LESTARI	1	P	V	SMK	P3K (01 Maret 2025)
57	EKO SUCAHYO	1	L	IX	S.1	P3K (01 Oktober 2025)
58	MARYANTO	1	L	V	SMK	P3K (01 Oktober 2025)
59	DITA YUNYANTI	1	P	-	S.1	TENAGA KONTRAK
60	NURMANTO	1	L	-	SMEA	TENAGA KONTRAK
61	RAGIL SANTOSO	1	L	-	SMP	TENAGA KONTRAK
62	HANUM FADHILAH HIDAYATI	1	P	IX	S.1	P3K (01 Oktober 2025)
63	MUHAMMAD SAHRI	1	L	V	SLTA	P3K (01 Oktober 2025)

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktur Sayuran dan Tanaman Obat (Revisi 7/Akhir)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya luas panen komoditas sayuran dan tanaman obat prioritas	1-1	Rata-rata luas panen komoditas sayuran prioritas	93.383 Ha
		1-2	Rata-rata luas panen komoditas tanaman obat prioritas	7.031 Ha
2	Tercapainya luas panen komoditas hortikultura prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	2-1	Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara	1.700 Ha
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat yang efektif, efisien dan akuntabel	3-1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	3,25 Skala Likert

KEGIATAN

1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

ANGGARAN

Rp. **185.550.333.000,-**

Pihak Kedua


Muhammad Taufiq Ratule

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama


Muhammad Agung Sunusi

Lampiran 3. Hasil Survey Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2025

NO	Uraian	Tingkat Kepentingan (%)	Tingkat Kepuasan (%)
	Tangibles (Berwujud)		
1	Kebersihan lingkungan ruang kerja Subbagian Tata Usaha	3,67	3,25
2	Kenyamanan ruang rapat dan kelengkapan fasilitas ruang rapat. (AC, kursi, meja, lampu, pc, infocus, mic, wifi, white board, dispenser, stop kontak)	3,64	3,38
3	Kebersihan toilet	3,70	3,26
4	Kelengkapan Toilet. (Kecukupan air, penerangan, westafel, kaca, hand soap, pewangi ruangan, penghisap udara, keset, tempat sampah, tissue, kloset)	3,70	3,05
5	Dekorasi tanaman hidup diluar dan didalam ruang kerja	3,48	3,20
	Reliability (Keandalan)		
6	Kemudahan mendapatkan/mengajukan layanan administrasi kepegawaian Subbagian Tata usaha (kenaikan pangkat, KGB, Cuti, Karis/Karsu, Pencantuman Gelar dll)	3,70	3,44
7	Kemudahan mendapatkan/mengajukan layanan administrasi keuangan Subbagian Tata usaha (Persekot, SPPD, Pencairan Anggaran II)	3,66	3,39
8	Kemudahan mendapatkan/mengajukan layanan layanan persuratan, rumah tangga dan kearsipan di Subbagian Tata Usaha (surat menyurat, ATK, arsip dokumen dll)	3,62	3,36
9	Kemudahan mendapatkan/mengajukan Barang Milik Negara di Subbagian Tata Usaha (penggantian inventaris kantor yang rusak/baru)	3,57	3,26
10	Ketepatan waktu pegawai Subbagian Tata Usaha terhadap penyelesaian permintaan layanan pegawai Direktorat	3,66	3,38
	Kompetensi dan Responsivitas Pegawai		
11	Tingkat kompetensi yang dimiliki pegawai Subbagian Tata Usaha dalam memberikan Pelayanan	3,64	3,34
12	Responsivitas dan Kecepatan Pegawai Subbagian Tata Usaha dalam menindaklanjuti pengaduan layanan	3,61	3,34
13	Keramahan pegawai Subbagian Tata Usaha dalam memberikan pelayanan	3,67	3,43
14	Kesesuaian antara realisasi layanan tata usaha dengan permintaan	3,64	3,31
	Assurance (Kepastian)		
15	Ketepatan dalam penyelesaian masalah layanan tata usaha	3,64	3,31
16	Inisiatif pegawai Subbagian Tata Usaha dalam memberikan pelayanan ketatausahaan	3,59	3,31
	Emphaty (Empati)		
17	Perhatian Dan Sikap Empati Pegawai Subbagian Tata Usaha Dalam Memberikan Pelayanan.	3,62	3,38
Rata-rata		3,64	3,32

Sumber : Responden Pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Langkah-langkah Pencapaian	Target (Ha)	Jadwal Palang			
				TW 1	TW 2	TW3	TW4
1	Rata-rata Luas Panen Komoditas Sayuran Prioritas	1. Pendampingan di tingkat petani dan kelompok yang terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses produksi, penanganan pasca panen, pemasaran, dan sistem informasinya. 2. Mendorong peningkatan kapabilitas kelompok tani melalui kerjasama kemitraan, pembentukan korporasi, sehingga memiliki skala ekonomi dan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani. 3. Penguatan kelembagaan kelompok tani baik secara horisontal maupun vertikal, melalui peningkatan kapabilitas petani/pelaku usaha dan manajemen agribisnis.	93.383	√	√	√	√
2	Rata-rata Luas Panen Komoditas Tanaman Obat Prioritas	1. Pendampingan di tingkat petani dan kelompok yang terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses produksi, penanganan pasca panen, pemasaran, dan sistem informasinya. 2. Mendorong peningkatan kapabilitas kelompok tani melalui kerjasama kemitraan, pembentukan korporasi, sehingga memiliki skala ekonomi dan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani. 3. Penguatan kelembagaan kelompok tani baik secara horisontal maupun vertikal, melalui peningkatan kapabilitas petani/pelaku usaha dan manajemen agribisnis	7.031	√	√	√	√

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I DITJEN HORTIKULTURA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

Tahun Anggaran : 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET
Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan pangan asal hortikultura dari produksi dalam negeri	1.	Pekarangan Hortikultura (Kelompok Masyarakat)	13.500
Sasaran: Meningkatnya produksi aneka cabai dan bawang putih	2.	Kawasan Aneka Cabai (Ha)	40
	3.	Kawasan Bawang Putih (Ha)	20

TARGET KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT

No	Kode	Kode	Indikator Kinerja	Target (Ton)
1	Komoditas Sayuran yang tersedia	1-1	Produksi cabai	3.076 Juta Ton
		1-2	Produksi bawang merah	1,995 Juta Ton
		1-3	Produksi sayuran umbi lain	1,890 Juta Ton
		1-4	Produksi sayuran buah lain	4,040 Juta Ton
		1-5	Produksi sayuran daun	3,420 Juta Ton
2	Komoditas tanaman obat yang tersedia	2-1	Produksi tanaman obat	825,2 Ribu Ton
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat yang efektif, efisien dan akuntabel	3-1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	3,25 Skala Likert

Lampiran 6. SK KEPMENTAN 109_TAHUN 2025_PERUBAHAN DUA_PJ_PROVINSI_KAB_KOTA_SWASEMBADA PANGAN



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 808/Kpts./KP.250/A/09/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PADA KEGIATAN
SWASEMBADA PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts./PW.020/M/06/2025, telah ditetapkan Penanggung Jawab Lapangan Program Luas Tambah Tanam Integrasi di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan substansi mengenai target luasan dan penanggung jawab di provinsi/kabupaten/kota, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts./PW.020/M/06/2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts./PW.020/M/06/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 109/KPTS./PW.020/M/03/2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PADA KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts./PW.020/M/06/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 September 2025

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Pertahanan;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
13. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia; dan
14. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian

No	PROVINSI DAN KABUPATEN	PENANGGUNG JAWAB	OPTIMASI LAHAN (HA) 2024	TARGET BRIGADE PANGAN 2024	OPTIMASI LAHAN (HA) 2025	CETAK SAWAH RAKYAT (HA) 2025	TARGET BRIGADE PANGAN 2025	TARGET LTT REGULER	TARGET PADI GOGO
11.	Tapanuli Selatan	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	600	3	952	-	5	63.284	200
12.	Nias Barat	Ketua Kelompok Pelindungan, Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Medan	480	2	954	-	5	9.947	750
13.	Langkat	Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	8.200	41	5.000	-	25	80.335	110
14.	Deli Serdang	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	7.036	35	5.477	-	27	101.023	110
15.	Tapanuli Utara	Aulia Rahmad Hasyim, S.Pt., M.Pt., Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	-	-	1.550	-	8	67.344	8.750
16.	Toba	Jin Tamin Saragih, S.P., Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	-	-	250	-	1	39.035	175
17.	Simalungun	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	-	-	-	-	-	118.117	5.500
18.	Dairi	Suheri Sitepu, S.P., Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	-	-	500	-	2	29.337	1.547
19.	Karo	Ketua Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	-	-	2.200	-	11	45.484	150
20.	Humbang Hasundutan	Kissey Bina Habeahan, S.P., Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	-	-	-	-	-	41.296	275
21.	Pakpak Bharat	Kissey Bina Habeahan, S.P., Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	-	-	-	-	-	7.401	750
22.	Samosir	Natalis Robinhu Saragih, S.P., Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	-	-	500	-	2	19.993	200
23.	Padang Lawas	Direktur Sayuran dan Tanaman Obat	-	-	500	-	2	28.259	475
24.	Padang Lawas Utara	Direktur Sayuran dan Tanaman Obat	-	-	2.500	-	12	78.118	480
25.	Kota Sibolga	-	-	-	-	-	-	-	-